

KEKERASAN DALAM REVOLUSI MESIR TAHUN 2011
BERDASARKAN KONSEP SEGITIGA KEKERASAN
SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SATRIO ARDHI PRIAMBODO

19323003

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

KEKERASAN DALAM REVOLUSI MESIR TAHUN 2011

BERDASARKAN KONSEP SEGITIGA KEKERASAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SATRIO ARDHI PRIAMBODO

19323003

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEKERASAN DALAM REVOLUSI MESIR TAHUN 2011
BERDASARKAN KONSEP SEGITIGA KEKERASAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

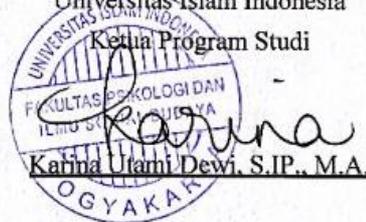
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
16 Agustus 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



SATRIO ARDHI PRIAMBODO

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Proses Penelitian</i>	<i>15</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN TERJADI	17
2.1 Faktor Kekerasan Kultural	17
<i>2.1.1 Pemusatan Kekuasaan NDP</i>	<i>17</i>
<i>2.1.2 Dominasi Militer dalam Sistem Sosial Politik</i>	<i>18</i>
<i>2.1.3 Aliansi Aktor Keagamaan dengan Politisi Elit</i>	<i>21</i>
2.2 Faktor Kekerasan Struktural	22
<i>2.2.1 UU Darurat</i>	<i>22</i>
<i>2.2.2 Pengangguran</i>	<i>26</i>
<i>2.2.3 Kemiskinan</i>	<i>29</i>
<i>2.2.4 Aturan bersifat Otoriter</i>	<i>31</i>
<i>2.2.5 Korupsi</i>	<i>35</i>

2.2.6 <i>Manipulasi Pemilu</i>	36
2.3 Faktor Kekerasan Langsung	40
2.3.1 <i>25 Januari 2011 – 11 Februari 2011</i>	40
2.3.2 <i>Pasca 11 Februari 2011</i>	41
BAB III	43
ANALISIS KEKERASAN YANG TERJADI	43
3.1 Kekerasan Kultural	43
3.2 Kekerasan Struktural	45
3.3 Kekerasan Langsung	52
BAB IV	57
PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

1 0.1 Segitiga Kekerasan (Galtung 1990).....	12
---	-----------

DAFTAR TABEL

2 0. Kesenjangan antara perkotaan-pedesaan di Mesir (di semua daerah) ...47

DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

PDB : Pendapatan Domestik Bruto

CPI : Corruption Perceptions Index

CAPMAS : Central Agency for Public Mobilization and Statistics

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

EIU : Economist Intelligence Unit

NDP : National Democratic Party

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

NPUP : Nationalist Progressive Unionist Party

NWP : New Wafd Party

USD : United States Dollar

IMF : International Monetary Fund

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tragedi yang terjadi di tahun 2011 selama delapan belas hari menjadi bagian dari sejarah bagi warga Mesir yang mana kondisi tersebut merupakan bagian dari sejarah revolusi yang mereka ciptakan. Melihat kondisi ini tidak terjadi begitu saja maka dengan ini penulis menganalisis bagaimana kasus yang mengorbankan keselamatan manusia dalam suatu negara yaitu Mesir ini bisa akhirnya perlahan terselesaikan.

Kekerasan dan demonstrasi tentunya terjadi bukan tanpa sebab akan tetapi hal ini muncul diakibatkan adanya protes terhadap rezim Hosni Mubarak yang telah memimpin Mesir selama lebih dari 30 tahun lamanya. Hal yang terjadi di Mesir ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Tunisia sepuluh hari sebelumnya yang mana mereka juga memprotes untuk meminta turunnya presiden Zine El Abidine Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun (Alin 2016).

Unjuk rasa dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Mesir ini mereka lakukan besar dikarenakan oleh sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh rezim Hosni Mubarak yang berjalan layaknya diktator. Keinginan untuk bangkit dari keterpurukan warganya dan melihat apa yang telah terjadi di Tunisia membuat semangat warga Mesir berkobar untuk melakukan hal yang serupa.

Dengan adanya tragedi secara serentak dan massal ini juga akhirnya yang membuat banyak warga yang dipenjara oleh aparat keamanan setempat sebanyak 600 orang di Kairo dan 120 orang di Asyuth, Mesir (Herald Sun 2011). Hal ini digunakan pemerintah untuk bisa benar-benar mengurangi animo masyarakat yang

melancarkan serangan selama demonstrasi berlangsung. Seperti yang tertulis oleh panitia yang dibentuk untuk menelusuri dan mengevaluasi tindakan aparat tindakan kepolisian dalam mengamankan demonstrasi yang menggunakan peluru karet, senapan, dan peluru tajam serta adanya penembak jitu yang berjaga di Tahrir Square (M. A. Abdelmottlep 2015).

Kondisi yang terjadi inilah kemudian akhirnya membuat seluruh masyarakat semakin sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan harus terus dijalankan selama perlakuan dan beragam tindakan diskriminatif pemerintah masih terus terjadi hingga presiden mereka harus benar-benar menyerahkan jabatannya dan mundur dari kursi kepresidenannya. Memang pada akhirnya Presiden Hosni Mubarak benar-benar turun dari jabatannya akan tetapi perjalanan menuju turunnya ini yang akhirnya harus dilalui dengan adanya pertumpahan darah yang wajib dibayarkan. Satu suara yang dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Mesir pada saat itu yang akhirnya juga menjadi acuan utama tentang bagaimana konflik meletus selama hampir tiga pekan lamanya.

Jelas dengan berkaca pada tragedi yang saat itu terjadi segenap mata dunia kian menjadi tertuju pada Mesir yang pada belasan hari tersebut membuat 384 jiwa melayang serta 6,467 jiwa yang alami luka-luka dengan beragam tingkatan yang mana hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sektor Kedokteran di Kementerian Kesehatan Mesir per tanggal 20 Februari 2011. Data ini sendiri kemudian bertambah pada jumlah korban meninggal sebanyak 846 jiwa yang disampaikan oleh salah satu petinggi di Kementerian Kesehatan Mesir selang satu hari dari data sebelumnya (M. A. Abdelmottlep 2015).

Sesuai pada penjelasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa keamanan masyarakat Mesir yang menyampaikan aspirasinya dan turun ke jalanan menjadi tidak berarti. Tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan rezim Hosni Mubarak bukan suatu tindakan yang dibenarkan karena sudah semestinya aparat keamanan melakukan langkah-langkah yang lebih humanis dalam menertibkan massa yang ada di jalanan dan bukan dengan menindak secara represif hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Berikutnya adalah tentang bagaimana kekuatan lebih dari 1 juta warga negara Mesir berkumpul dan turun ke jalan pada beberapa kota di Mesir yang ini menunjukkan bahwa mereka ingin sekali bangkit dari kelamnya kehidupan mereka selama Hosni Mubarak masih menjabat sebagai presiden (M. A. Abdelmottlep 2015). Tentu bukan tanpa alasan bagaimana bisa banyak sekali bukti konkret yang menunjukkan bahwa negara Mesir ini merasa banyak sekali tindakan kejahatan yang banyak terjadi pada masa pemerintahan Hosni Mubarak baik dari adanya korupsi, angka pengangguran yang tinggi, kondisi warga yang mayoritas tetap miskin walau secara PDB Mesir meningkat, dan tindakan brutal aparat keamanan selama rezim Hosni Mubarak berkuasa.

Salah satu faktor diatas dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi yang bekerja untuk pemerintahan ini sendiri. Seperti yang dilansir oleh *Transparency International's Corruption Perception's Index* di tahun 2010 yang menunjukkan Mesir memiliki nilai skor CPI 3.1 (dengan skala 10 tidak terdapat korupsi dan 0 memiliki banyak kasus korupsi). Kasus-kasus korupsi ini juga terjadi begitu saja dan sudah dianggap sebagai hal yang sangat biasa terjadi didalam Mesir selama era Hosni Mubarak masih berkuasa,

karena yang ditunjukkan pada warganya adalah keadaan dimana hampir seluruh kerabat, teman, dan orang-orang yang hidup di sekeliling Hosni Mubarak akan mudah mendapatkan bagian dari jatah yang dibagikan pada mereka selama mereka hidup dalam satu suara yang selalu mendukung gerakan-gerakan pemerintah dan tidak melawan setiap keputusan yang dibuat (Firman 2021).

Keinginan untuk bangkit berikutnya juga didasarkan pada rasa tidak berdaya masyarakat Mesir yang sudah puluhan tahun harus bersabar menahan segala keinginan untuk protes dan memberontak pada kepemimpinan Hosni Mubarak yang selalu bersikap diktator. Maka dengan adanya kesempatan yang muncul untuk memberontak ini akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh segenap masyarakat Mesir untuk benar-benar maju melawan semua perangkat pemerintah dan memprotes mereka untuk segera turun dari jabatannya.

Fenomena ini sendiri sebenarnya merupakan dampak yang diberikan oleh bangsa-bangsa barat yang sedikit demi sedikit memberikan stigma pada masyarakat Timur Tengah dan beberapa bagian di Afrika untuk bisa mengekspresikan keinginan dan juga keluar dari praktek-praktek diktator yang saat itu banyak dilakukan oleh pemimpin di kawasan tersebut. Kata demokrasi menjadi semangat masyarakat Mesir saat itu yang berkaca pada warga Tunisia yang juga melakukan praktek mereka demi mengupayakan adanya sistem demokrasi yang dirasa lebih baik. (Sahide, et al. 2015)

Rasa tidak percaya pada pemerintah akhirnya terbentuk secara perlahan dari mulut ke mulut yang tersebar dan digaungkan oleh salah satu eksekutif *Google* lewat jejaring sosial *Facebook* yang bernama Wael Ghonim dengan membuat laman berjudul "*We Are All Khaled Said*" yang berisikan konten tentang seorang

pemuda bernama Khaled Said yang tewas karena dianiaya oleh Polisi lalu dirinya menginisiasikan untuk melakukan gerakan demonstrasi di tanggal 25 Januari 2011 disaat Tunisia juga sedang terjadi proses pergolakan untuk menurunkan Presiden Zine El-Abidine Ben Ali (Juned, et al. 2012).

Runtutan fenomena Revolusi Mesir ini disebabkan oleh suatu isu yang biasa dikenal dengan nama *Arab Spring* yang saat itu dipelopori oleh banyak bangsa di Eropa pada banyak masyarakat di Timur Tengah ini untuk bisa bangkit dan memberikan suara serta pendapat mereka tentang bagaimana menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis sehingga proses *check and balance* dapat berfungsi dengan harmonis.

Dengan beragam faktor diatas yang telah disebutkan maka bisa dipahami bersama bahwa latar belakang terjadinya tragedi Revolusi Mesir di tahun 2011 disebabkan karena adanya rasa kecewa yang sangat mendalam dan sudah mengakar puluhan tahun lamanya. Sehingga tragedi besar seperti ini menjadi tidak bisa terelakkan sama sekali dan justru kembali sangat merugikan warga Mesir yang menyuarkan suaranya dengan turun aksi demonstrasi menuntut revolusi ini sendiri. Sehingga dengan ini saya akan menganalisis bagaimana kasus kekerasan ini bisa terselesaikan hingga tuntas dan bagaimana dampaknya hingga masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan terjadi didalam Revolusi Mesir tahun 2011 berdasarkan konsep segitiga kekerasan oleh Johan Galtung?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Salah satu tujuan dari penelitian yaitu untuk dapat menganalisa bagaimana penyebab dari segitiga kekerasan bisa bermula dan terjadi di dalam Revolusi Mesir tahun 2011.
2. Berikutnya adalah untuk dapat mengidentifikasi tragedi Revolusi Mesir 2011 ini masuk ke dalam kategori kekerasan yang mana dari ketiga konsep segitiga kekerasan yaitu kekerasan langsung, struktural, dan juga kultural.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menyuguhkan kepada pembaca bagaimana Revolusi Mesir di tahun 2011 memberikan dampak yang sangat luar biasa yaitu dengan konsep teori segitiga kekerasan yang menjelaskan bagaimana ribuan jiwa menjadi korban baik meninggal dunia dan luka-luka. Sehingga penelitian ini sendiri akan terbatas tentang bagaimana kekerasan bisa terjadi selama Revolusi Mesir di tahun 2011 berlangsung hingga naiknya Abdul Fattah as-Sisi menjadi Presiden Mesir yang nantinya agar bisa dapat dipahami oleh pembaca secara baik dan komprehensif. Oleh karena itu disini menuliskan data penunjang yang berasal sejak tahun 1990-an demi melengkapi kelengkapan data dan keruntutan linimasa dari waktu ke waktu.

1.5 Tinjauan Pustaka

Diawali oleh buku yang berjudul *“Egypt in A Time of Revolution : Contentious Politics and The Arab Spring”* (Ketchley 2017) yang dengan rinci menjelaskan satu-persatu tentang bagaimana proses terjadinya Revolusi Mesir di tahun 2011 hingga berakhir. Buku ini memberikan gambaran bahwa sejak awal mula Mesir yang sudah dipimpin oleh Husni Mubarak selama 30 tahun menjadikan pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersifat otoriter dan represif sehingga ketika isu *Arab Spring* merebak di Jazirah Arab Saudi yang akhirnya memicu keinginan besar warganya untuk bisa hidup di negara yang demokratis.

Berkesinambungan dengan tulisan diatas bahwa tulisan yang berjudul *“The Fall of President Muhammad Hosni Mubarak and The Prospects for Democratization in Egypt”* (Khasyi'in 2019) dengan lugas mengatakan bahwasannya dengan jatuhnya Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir menunjukkan skala demokrasi sudah seharusnya mulai terwujud setelah kepemimpinannya yang jauh dari kata demokratis sebelumnya. Pada buku ini juga menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu hal yang diinginkan untuk dimiliki oleh warga Mesir setelah hidup dalam beragam ancaman sehingga tidak bisa memiliki kebebasan dalam berkegiatan.

Pada tulisan yang berjudul *“Decree 162 on the State of Emergency (no longer in force)”* (International Center For-Not-For Profit Law 1962) menjelaskan bahwa poin-poin mengenai UU darurat No. 162 tahun 1958 benar-benar sangat menyulitkan warga Mesir untuk bisa menggunakan hak mereka sebagai warga negara dengan tenang diakibatkan banyaknya pasal yang sangat menyudutkan dan merampas hak warga sipil itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan

berlakunya UU ini selama tiga dekade lamanya benar-benar membuat warga Mesir hidup harus terbiasa dan hidup dalam kesengsaraan.

Melanjutkan tulisan sebelumnya yakni pada tulisan yang berjudul "*Egyptian Revolution: Causes, Incidents and Results*" (Mohamed 2013) telah jelas dijelaskan oleh penulis bahwa dengan beragam faktor dan sebab yang terjadi di Mesir membuat Revolusi Mesir terjadi di tahun 2011. Tidak hanya itu melainkan disini penulis juga menjelaskan secara detail terkait bagaimana Hosni Mubarak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang yang akhirnya membuat warga Mesir geram dan berujung pada tragedi tersebut.

Kemudian selanjutnya pada tulisan yang berjudul "*The Egyptian revolution: an analysis of the Egyptian police response, the way to the Egyptian police reform (subjective projection)*" (M. A. Abdelmottlep 2015) mengungkapkan bahwa didalam tragedi Revolusi Mesir pemerintah memiliki struktur yang sangat tertata dengan rapi untuk bagaimana bisa menumpas para demonstran hingga banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Disini juga penulis menyampaikan bahwa dengan aksi brutal dari para aparat keamanan mereka tidak lagi mengindahkan aturan yang mereka buat sendiri dan justru main hakim sepihak.

Kedudukan penulis disini berusaha untuk menjelaskan mengapa Revolusi Mesir bisa terjadi yang akhirnya harus mengakibatkan banyaknya jatuhnya korban. Dan pada tulisan ini penulis tentu akan menganalisis tentang bagaimana konflik Revolusi Mesir 2011 bisa terjelaskan nantinya menggunakan konsep teori segitiga kekerasan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana Teori Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung menjadi alat analisis tentang bagaimana kekerasan bisa terjadi saat berlangsungnya Revolusi Mesir ini sendiri. Segitiga Kekerasan ini sendiri teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung pada tulisannya *Cultural Violence* pada tahun 1990 (Galtung 1990, 291).

Seperti yang dijelaskan oleh Galtung bahwa dalam konsep Segitiga kekerasan dia menjelaskan bahwa didalamnya terdapat tiga bagian yang mengisi ketiga poin utama. Kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung merupakan ketiga poin yang dicantumkan Galtung pada konsep segitiga kekerasan miliknya tersebut.

Kekerasan kultural sendiri seringkali menjadi suatu alat untuk mengesahkan atau melegitimasi kekerasan struktural maupun kekerasan langsung. Dalam pembagiannya sendiri kekerasan kultural terbagi dalam beberapa bagian diantaranya adalah bahasa, ideologi, agama, seni, ilmu formal, dan juga ilmu empiris. Secara bahasa kultural yang berarti budaya ini yang akhirnya membuat kekerasan bentuk ini seringkali membuat suatu kekerasan terlihat biasa dan bahkan menjadi sebuah tolak ukur pembenaran ketika terjadi suatu kekerasan seperti ini di kehidupan sosial manusia sekitar. Bahkan pula dengan kekerasan kultural ini baik kekerasan struktural dan langsung menjadi terlihat benar.

Perumpamaan Galtung dalam menggambarkan kekerasan kultural ini seperti permainan warna yang mulanya kesalahan ini digambarkan dengan warna hitam akan terlihat menjadi abu-abu karena sejatinya titik kebenaran pada kekerasan kultural ini sudah terkaburkan dari fakta yang semestinya (Galtung

1990, 291).

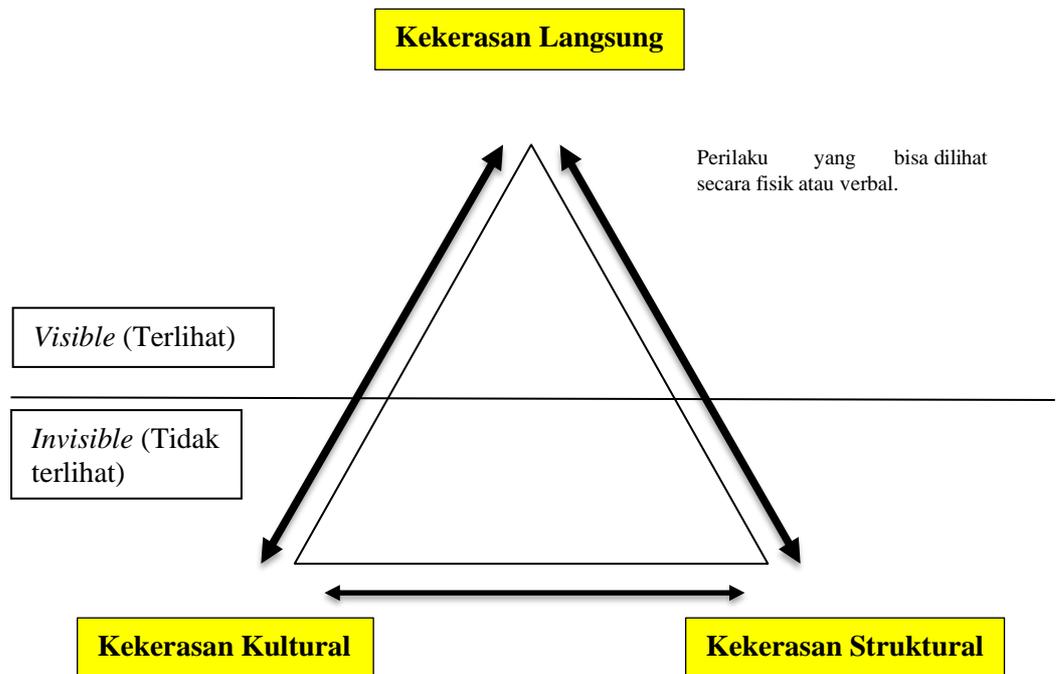
Berikutnya adalah kekerasan struktural merupakan sebuah bentuk kekerasan yang berujung pada melukai kebutuhan primer dari manusia akan tetapi pelaku utama dari kejahatan ini sendiri tidak bisa dituding sebagai pelaku dikarenakan kejahatan ini sudah terbentuk secara rapih dengan koordinasi. Dalam kekerasan ini Galtung memberikan penjelasan yang mana terdapat empat pilar utama yang menjadi aspek yaitu kekerasan struktural *survival needs*, *well-being needs*, *identity needs*, dan *freedom needs*. Kekerasan struktural *survival needs* dapat berbentuk seperti adanya pembagian yang tidak seimbang sehingga menyebabkan ada pihak yang mengalami kerugian sehingga tertindas seperti kelaparan. Berikutnya terkait kekerasan struktural *well-being needs* yang mana kekerasan ini melukai kesejahteraan dapat berbentuk seperti adanya penyakit atau gizi buruk.

Berikutnya adalah kekerasan struktural *identity needs* yang mana ini mencederai sebuah identitas dan dalam prakteknya terbagi dalam tahap penetrasi dan segmentasi. Dimulai dari penetrasi yang bertugas sebagai alat untuk *brainstorming* pada suatu kelompok lemah yang berikutnya dipadukan dengan segmentasi sehingga menimbulkan opini yang tidak utuh pada kenyataan di lapangan. Berikutnya adalah kekerasan struktural *freedom needs* yang ini menyasar pada kebebasan. Bentuk kekerasan ini terbagi pada dua tahap yaitu marginalisasi yang memiliki fungsi untuk melindungi pihak yang terlihat lemah yang kemudian diserasikan dengan fragmentasi yang mana ada sejumlah bidak dipasang guna membentengi pihak yang lemah sebelumnya dengan pihak yang lemah lainnya sehingga terdapat tembok besar untuk bisa saling berhubungan (Galtung 1990, 294).

Selanjutnya yaitu kekerasan langsung yang sifatnya tampak dan tidak dapat ditutupi sehingga antara pelaku dan korban menjadi kedua pihak yang pasti terlihat. Dalam kekerasan langsung ini sendiri Galtung membagi kedalam empat pilar utama. Pertama adalah kekerasan langsung *survival needs* yang menimbulkan kerugian pada suatu masyarakat seperti tindakan menghilangkan nyawa manusia. Kedua yakni kekerasan langsung *well-being needs* yaitu seperti munculnya kesengsaraan yang diakibatkan mulanya oleh adanya suatu pembatasan seperti raibnya kebebasan ataupun kesejahteraan bermula dari adanya tindakan pengasingan atau pemboikotan. Ketiga kekerasan langsung *identity needs* berbentuk seperti adanya pengucilan disertai dengan adanya stigma yang beredar di masyarakat dan hal ini terlihat nyata seperti gangguan dalam praktik berbahasa. Keempat adalah kekerasan langsung *freedom needs* seperti adanya penahanan dalam sel penjara dibarengi dengan pengusiran. Akan tetapi kekerasan langsung tidak terbatas pada keempat hal diatas melainkan terdapat kekerasan langsung berupa tindakan verbal yang dibahas lebih dalam oleh Galtung (Galtung 1990, 293).

Berikut gambar segitiga kekerasan oleh Johan Galtung yang menggambarkan hubungan dari ketiga bagian dari konsep segitiga kekerasan ini sendiri.

Gambar 1.1 Segitiga Kekerasan (Galtung 1990, 292).



1 0.1 Segitiga Kekerasan (Galtung 1990)

Sifat Inklusif/Eksklusif, berasal dari budaya yang turun temurun sampai mampu untuk melegitimasi kekerasan struktural dan langsung.

Berupa tindakan represif, eksploitasi, dan sebagainya. Sehingga muncul ketidaksetaraan dan keadilan dalam sosial masyarakat.

Dari penggambaran tersebut bisa menjadi sebuah alat ukur bagaimana kekerasan bisa terjadi baik secara kekerasan langsung, struktural, maupun kultural yang ketiganya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dalam hal ini tentu kekerasan langsung jelas merupakan sebuah kekerasan yang terlihat langsung dan di bagian lain terdapat kekerasan struktural dan kultural yang menjadi bentuk kekerasan yang tidak terlihat.

Melalui konsep yang tertuang dalam gambar tersebut maka disini penulis bisa menggambarkan bahwa dalam Revolusi Mesir di tahun 2011 ini memiliki

hubungan kekerasan yang saling berkaitan yang mana pihak aparat keamanan menggunakan tindakan represif dan tergolong kekerasan kultural dengan adanya fakta bahwa Hosni Mubarak menggunakan kekuasaannya untuk benar-benar membungkam gerakan-gerakan anti politik dengan bantuan militer dan kepolisian sehingga rakyat tidak dapat menggunakan hak kebebasannya untuk memberikan suara yang mana ini dibuktikan dengan adanya 5.000 hingga 10.000 orang yang dipenjara selama pemerintahan Hosni Mubarak karena berusaha melawan pemerintahan.

Hal ini berlanjut dengan kekerasan struktural yang dimana rezim Hosni Mubarak sudah menganggap tindakan mereka dengan mengamankan amukan massa demonstrasi menggunakan senjata dikarenakan adanya aturan UU Darurat yaitu UU No. 162 tahun 1958 yang memberikan kekuasaan polisi menjadi lebih diperluas dan membatasi demonstrasi jalanan. Kemiskinan, pengangguran, aturan yang bersifat otoriter, korupsi, dan manipulasi pemilu juga masuk kedalam kategori kekerasan struktural ini sendiri.

Selanjutnya kekerasan langsung tampak ketika fakta menyebutkan bahwa tindakan mengamankan aksi demonstrasi memakai senapan, peluru karet, senapan, dan bahkan penembak jitu yang juga digunakan dalam aksi pengamanan sehingga terdapat sebanyak 846 jiwa yang melayang dan kurang lebih 600 jiwa ditahan di Kairo dan 120 jiwa lainnya ditahan di Asyut saat Revolusi Mesir berlangsung. Tidak hanya itu melainkan kekerasan langsung ini sendiri nyatanya belum berakhir di tanggal 11 Februari 2011 melainkan setelahnya juga pihak aparat keamanan masih belum mereformasi tubuh mereka dan justru bertindak semakin sewenang-wenangnya.

1.7 Argumen Sementara

Setelah melihat kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, disini penulis menilai dan memiliki argumen sementara bahwa Revolusi Mesir yang terjadi di tahun 2011 masuk kedalam bentuk konsep teori segitiga kekerasan. Terlebih kekerasan yang terjadi pada waktu itu jelas dilakukan oleh pihak pemerintah yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga Mesir sehingga hal ini secara jelas sudah masuk pada konsep segitiga kekerasan tersebut.

Kekerasan yang dimaksud disini adalah yaitu kekerasan langsung dan struktural yang terlihat secara nyata. Sehingga hal ini yang dimaksud oleh penulis tentang bagaimana segitiga kekerasan merupakan suatu teori yang layak untuk dijadikan pengiris dalam konflik yang terjadi pada Revolusi Mesir ini sendiri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada tulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif oleh John W Cresswell dengan adanya upaya untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami suatu tragedi yang dimana hal itu dianggap menjadi permasalahan sosial atau kemanusiaan oleh individu maupun sekelompok orang. Metode ini sendiri berpacu pada rujukan ilmiah dan literatur berupa media cetak seperti buku dan juga pada media digital seperti kumpulan jurnal, berita, dan juga reportase lapangan mengingat saat ini untuk mencapai akses ke semua hal semakin dipermudah dengan adanya akses internet.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya sendiri adalah rezim Hosni Mubarak. Adapun objek penelitiannya adalah penyebab dan bentuk kekerasan yang terjadi pada kasus Revolusi Mesir 2011.

1.8.3 Proses Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini maka peneliti akan melalui proses pengumpulan data yang bersifat kolektif dan menyeluruh baik dari media cetak seperti buku dan juga media digital yang bisa diakses menggunakan internet. Sehingga dengan bersifat menyeluruh ini harapannya penelitian bisa disajikan secara lengkap dan komprehensif agar menciptakan harmonisasi dalam pembacaan dan proses memahami.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 menjelaskan terkait latar belakang bagaimana Revolusi Mesir bisa bermula, disebabkan oleh terjadinya peristiwa Arab Spring hingga berakhirnya Revolusi Mesir di tahun 2011.

Bab 2 memberikan pembahasan mengenai data-data dan informasi yang lengkap serta komprehensif dimasa Hosni Mubarak saat memimpin Mesir dan hal apa saja yang menyebabkan Revolusi Mesir terjadi sehingga pemahaman pembaca bisa menyeluruh.

Bab 3 memaparkan analisis mengenai Konsep Segitiga Kekerasan yang mengancam masyarakat Mesir sehingga menyebabkan Revolusi Mesir terjadi yang dilihat dari beragam data primer maupun sekunder sehingga memenuhi variabel

dari teori segitiga kekerasan ini sendiri. Pada bagian ini juga peneliti akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah pada penelitian bisa terjawab melalui teori diatas.

Bab 4 menjadi bagian dari kesimpulan yang menjadi penutup pada penelitian ini dan juga akan dijelaskan didalamnya rangkuman dari awal hingga akhir penelitian sehingga pembaca bisa memahami penulisan secara detail dan mendalam.

BAB II

ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN TERJADI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai beragam data yang dikumpulkan dari media internet yang mana nantinya dari data-data ini menjadi sebuah kumpulan fakta untuk bisa dianalisis secara komprehensif pada bab berikutnya. Oleh karena itu penulis menuliskan data-data utama pada kasus Revolusi Mesir tahun 2011 secara utuh dan lengkap agar analisis terkait kasus ini bisa tergambarkan secara mendetail.

2.1 Faktor Kekerasan Kultural

2.1.1 Pemusatan Kekuasaan NDP

Partai NDP merupakan sebuah partai politik yang memiliki pengaruh mayoritas besar di Mesir sehingga ini membuat partai politik lainnya tidak terlihat signifikan. Akan tetapi di Mesir pada tahun 1990 diperkenalkan sistem pemilu baru yaitu berupa sistem kandidat individu. Reformasi sistem ini didasari pada apa yang terjadi di tahun 1987 yang mana pada tahun tersebut pemilu berlangsung dengan diskriminasi pada calon independen (Kassem 1999).

Sistem pemilu kemudian berjalan dengan sistem pencalonan individu dengan total konstituen dua orang anggota yang beragam yaitu satu orang berasal dari golongan pekerja atau petani dan satu orang lagi dari golongan profesi liberal. Kondisi ini dimanfaatkan Partai NDP dengan baik dimana mereka mengirimkan kader mereka dan memasukannya dari kedua golongan diatas sekaligus di tiap daerah pemilihan dimulai dari pemilu di tahun 1990 hingga 2010. Kondisi ini membuat partai kecil lainnya hanya bisa mendaftarkan kandidatnya berasal dari daerah-daerah kecil tertentu dengan jumlah yang tidak seberapa (Koehler 2017).

Berikut data mengenai kondisi diatas :

Tabel 1.1 Pemilu Era Hosni Mubarak

Year	<i>Hizb al- Watani al- Dimuqrati</i> (NDP) (share)	<i>al-Ikhwan al- Muslimin</i> (MB) (share)	Strongest opposition party (share)
1984	390 (87%)	9 (2%)	49 (11%) ^a
1987	348 (77%)	38 (8%)	36 (8%) ^a
1990	360 (81%)	— ^b	5 (1%) ^b
1995	417 (94%)	1 (0.2%)	6 (1%) ^a
2000	388 (88%)	17 (4%)	7 (2%) ^a
2005	311 (72%)	88 (20%)	6 (1%) ^a
2010	420 (83%)	1 (0.2%)	6 (1%) ^a

Sumber : (Masoud 2014)

Dapat disaksikan bersama bahwa di setiap pemilu Partai NDP berhasil melakukan upayanya untuk dapat berkuasa sehingga partai politik lainnya dapat tersingkirkan dengan mudah. Kemenangan telak di tiap pelaksanaan pemilu oleh Partai NDP ini yang membuat kekuatan partai tidak hanya berpusat di satu titik melainkan tersebar secara merata dengan baik.

2.1.2 Dominasi Militer dalam Sistem Sosial Politik

Dominasi militer di Mesir merupakan bagian turun temurun yang tidak bisa dipisahkan karena sesuai sejarah yaitu pada bulan Juli 1952 untuk pertama kali akhirnya Mesir dikuasai oleh militer dibawah komando Jamal Abd al-Nasir dengan pasukannya yang bernama Free Officers Movement. Dibawah rezim yang dia pimpin membuat Mesir menuju langkah yang lebih baik, hal ini disebabkan oleh adanya langkah yang diwujudkan dengan menyita tanah dari pemilik tanah dengan luasan yang besar dan dibatasi hanya boleh memiliki tanah seluas 200 acre per orang dan membagikan tanah lainnya kepada petani yang tidak memiliki tanah (Issawi 1995).

Dibawah rezim Nasir juga terdapat gerakan sekuestrasi terhadap perusahaan baik yang ada didalam maupun luar negeri dimulai dengan nasionalisasi Terusan Suez yang kemudian ini ditutup dengan penyitaan atas bank komersial, perusahaan asuransi, dan juga bisnis perdagangan luar negeri di tahun 1960-an. Bahkan sesuai dengan data bahwa di tahun 1965 sektor publik berhasil menyumbangkan 95% dari seluruh investasi dan berhasil menguasai 83% dari seluruh alat produksi yang mana ini merupakan dampak dari dominasi militer di kehidupan sosial politik pada era tersebut (Al-Rahman 1977).

Era kepemimpinan Anwar Sadat dimulai pada tahun 1970 ketika Nasir meninggal dunia yang mana kemudian ini memberikan tantangan tersendiri bagi Sadat dikarenakan dirinya tidak memiliki basis politik sendiri dan tidak memiliki karisma sama seperti Nasir sebelumnya. Akan tetapi meskipun demikian arah pandang mengenai profesionalisme dan kesiapsiagaan militer masih tetap sama dengan periode Nasir (Harb 2003).

Tidak heran jika dirinya juga merekrut pasukan militer banyak dari lulusan universitas demi kemajuan militer. Hal ini yang kemudian membuat Mesir berani untuk menekan pihak Uni Soviet kala itu hingga mereka mau untuk memasok senjata dan perlengkapannya sehingga setara dengan yang dimiliki oleh Israel. Kondisi ini ditujukan untuk menunjukkan kesiapsiagaan militer Mesir dan untuk menjalankan serangan dadakan dengan menyeberangi Terusan Suez yang kemudian berpusat di Dataran Tinggi Golan pada Oktober 1973 (Harb 2003).

Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi militer di era Sadat ini sedikit melemah ketimbang periode Nasir terbukti dengan proporsi anggota militer yang berkurang di jabatan pemerintahan. Sesuai dengan data bahwa

di 1967 kehadiran militer di kabinet pemerintah berkisar 41% hingga 66% yang mana ini turun drastis sebesar 22,2% di tahun 1972 (Abdalla 1988).

Sepeninggal Sadat karena terbunuh dan dilanjutkan oleh Hosni Mubarak kondisi militer di Mesir semakin membaik kembali. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi dimana militer Mesir diperbolehkan untuk masuk ke sektor ekonomi yang bergerak sebagai institusi yang produktif. Militer Mesir dalam hal ini ikut mengambil peran di produksi perangkat keras militer baik itu kendaraan pengangkut lapis baja, helikopter, tank, pesawat, radar mesin pesawat, dan juga elektronik. Industri ini sendiri menghasilkan lebih dari USD 500 juta pertahunnya dan masuk kedalam PDB Mesir bahkan produksinya juga banyak yang diekspor keluar Mesir juga. Dampak dari hal ini juga membuat swasembada pangan Mesir berada di tingkat 100% baik secara produksi maupun distribusi. Berikutnya Mesir juga berhasil membangun jalan layang, sekolah, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya (Brooks 1998).

Melihat kondisi seperti ini terdapat beberapa kritik yang ditujukan kepada militer Mesir yaitu seperti terkait kebijakan pertahanan, pengeluaran militer dan kemandirian finansial, dan hak istimewa militer. Bahkan terdapat kekhawatiran tersendiri pada bagaimana peran militer dalam pemerintah Partai NDP. Oleh karena itu Imad Harb disini menilai bahwa militer tetap menjadi pusat politik Mesir karena telah berhasil menyediakan basis kekuasaan bagi Presiden dan perlindungan bagi rezim yang memimpin (Harb 2003).

2.1.3 Aliansi Aktor Keagamaan dengan Politisi Elit

Dalam hal ini terdapat beberapa data yang menjelaskan bahwa agama berulang kali dijadikan alat legitimasi politisi elit untuk melakukan tindakannya. Kondisi ini dilakukan langsung oleh tokoh pemuka agama yang mana baik ucapan atau tindakannya menjadi alasan tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh politisi tersebut wajib untuk dipatuhi oleh warga Mesir.

Seperti yang pernah disampaikan langsung oleh Ali Gomaa seorang mufti di Mesir bahwa “Siapa pun yang mematuhi Presiden Abdel Fattah al-Sisi mematuhi nabi dan siapapun yang tidak mematuhinya berarti tidak mematuhi Nabi” (Al-Youm 2015). Dapat dinilai bahwa kalimat ini merupakan salah satu bentuk klaim sepihak dengan tujuan agar berbagai tindakan Presiden yang dimaksud tidak mendapat pertentangan.

Tidak hanya itu saja melainkan tiga lembaga keagamaan di Mesir seperti Al-Azhar, Dar al-Iftaa, dan Kementerian Wakaf juga justru menjadi alat propaganda demi mendukung kebijakan Presiden Mesir al-Sisi. Bahkan selama enam tahun terakhir ini Dar al-Iftaa justru lebih banyak mengeluarkan fatwa mendukung kebijakan Presiden Mesir. Bahkan dalam suatu kesempatan Dar al-Iftaa sempat menyampaikan bahwa warga Mesir memiliki kewajiban untuk patuh pada ancaman dari Presiden al-Sisi karena setiap oposisi dari pemerintahan akan dianggap *haram* (al-Anani 2020).

2.2 Faktor Kekerasan Struktural

2.2.1 UU Darurat

UU darurat ini sendiri mulai efektif dinyatakan sah sebagai peraturan sejak tanggal Rabi' Al-Awwal 13, 1378 Hijriah atau 27 September 1958 Masehi, yang mana saat itu disahkan langsung oleh Kepresidenan Republik dan diumumkan oleh Lembaran Negara Resmi dan akan diberlakukan sejak tanggal penerbitan UU ini sendiri (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

Sesuai dengan sejarahnya UU sejak diputuskan belum pernah digunakan oleh pemerintah Mesir sampai pada tahun 1967 dikarenakan terjadinya Six-Day-War yang terjadi pada 5-10 Juni 1967 antara pihak Israel dan Arab (Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Al-Jazair, Arab Saudi, Sudan, Tunisia, Libya, dan Maroko) (Krauthammer 2007).

Dampak dari peperangan inilah yang membuat UU darurat diberlakukan untuk pertama kalinya di Mesir. Setelahnya keadaan Mesir mulai kembali menuju fase darurat di bulan Mei tahun 1980 dan puncaknya adalah dengan terbunuhnya Presiden Anwar Sadat di tanggal 6 Oktober 1981, yang mana dengan kondisi ini membuat UU darurat efektif diberlakukan kembali. Pemberlakuan UU darurat ini sendiri tiap dua tahun sekali diperpanjang masa berlakunya hingga Presiden Hosni Mubarak menyatakan dirinya untuk lengser dari kursi kepresidenan (International Commissions of Jurist 2009).

Dari pasal-pasal diatas tampak bahwa dengan efektifnya UU darurat ini membuat aparat keamanan pemerintah Mesir bisa bertindak represif bahkan dengan menggunakan senjata. Oleh karena itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa dengan adanya UU ini

membuat kurang lebihnya 5.000 hingga 10.000 orang telah dipenjara jangka panjang tanpa ada dakwaan atau pengadilan (Amnesty International 2010), 17.000 orang lagi lainnya dipenjara karena dampak dari UU ini, dan 30.000 orang lainnya lagi dikarenakan bertentangan dengan politik pemerintah (Al-Ahram 2005).

Hal ini diperparah dengan berlakunya UU darurat sejak Hosni Mubarak menjabat sebagai Presiden Mesir di tahun 1981 setelah Anwar Sadat Presiden Mesir sebelumnya terbunuh yang mana hal inilah yang menjadi dasar UU darurat diberlakukan. Keadaan semakin membuat Hosni Mubarak nyaman dikarenakan dirinya bebas memberlakukan UU ini dan memperbarui masa berlakunya tiap dua tahun sekali yang mana pemerintah beralasan bahwa mereka belum siap untuk menerbitkan UU terorisme yang baru dan juga tidak bisa begitu saja untuk menonaktifkan UU darurat dikarenakan bergantung pada aparat keamanan untuk memerangi aksi terorisme yang tidak bertanggung jawab (The Egyptian Organization for Human Rights 2008).

Dalam pasal satu dan dua dari UU No. 162 tahun 1958 sendiri berbunyi yang kaitannya dengan keadaan bahwa UU darurat ini bisa berlaku ketika keamanan atau ketertiban secara umum menjadi terganggu yang bisa terjadi akibat adanya peperangan, epidemi, bencana, dan gangguan internal. Berikutnya adalah terkait pemberlakuan dan penghentian berlakunya UU ini harus melalui keputusan Presiden Republik yang menjabat.

Berikutnya dalam pasal tiga sendiri menjelaskan bahwa ketika UU darurat ini efektif diberlakukan maka warga dibatasi kebebasannya untuk bertemu sesama, bertempat tinggal, serta dibatasi pula untuk bisa melewati sebuah tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya pihak aparat keamanan bisa menangkap tersangka,

menahannya, dan juga menggeledah orang juga tempat tanpa perlu adanya izin sebelumnya (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

Adanya juga perintah untuk mengamati surat kabar, pamflet, dan semua alat propaganda lainnya sebelum diterbitkannya. Tidak hanya itu melainkan adanya juga pengaturan terkait penetapan jam buka dan tutup toko umum. Selanjutnya pihak aparat keamanan juga diberikan hak untuk menyita barang bergerak, rumah, lembaga, dan perusahaan sekalipun.

Peraturan ini juga mengatur bagaimana mereka bisa mencabut lisensi senjata dan bahan peledak yang dimiliki oleh perseorangan tertentu. Pemerintah dalam peraturan ini juga diberikan hak untuk dapat mengevakuasi atau mengisolasi suatu daerah, mengatur juga terkait seluruh alat transportasi yang berjalan. Dalam pasal selanjutnya diatur pula bagaimana jika terdapat warga yang ditahan oleh aparat yang diberi waktu untuk mengadukan perintah penahanan kepada Mahkamah Agung Keamanan Negara apabila telah melewati masa enam bulan setelah dirinya ditahan tanpa adanya pembebasan (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

Berikutnya adalah yang tertuang pada pasal empat yaitu tentang bagaimana aparat keamanan bersenjata wajib melaksanakan perintah presiden ataupun wakilnya dan pegawai negeri memiliki kewajiban untuk membantu para aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. Dalam pasal lima sendiri menyatakan bahwa perintah presiden atau yang menggantikannya wajib untuk dilaksanakan dikarenakan apabila terdapat pihak yang tidak tunduk pada perintah ini maka akan diberi hukuman selama hukuman ini tidak melebihi derajat kerja paksa serta denda empat puluh ribu pound yang dibebankan pada pihak yang yang dinyatakan

bersalah. Dan kondisi ini diperparah dengan ketentuan yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melanggar seluruh ketentuan dalam UU ini maka dapat segera ditangkap yang ini tertuang dalam pasal enam (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

Selanjutnya dalam UU ini sendiri menjelaskan bagaimana pemerintah Mesir menentukan kemampuan berjalannya proses hukum bagi para pelaku kejahatan yang sesuai dengan kriteria pada UU ini yang hal ini tertera dalam pasal tujuh dan delapan. Terkait bagaimana proses pengadilan bagi pelaku kejahatan dijelaskan secara detail pada pasal sembilan, sepuluh, sebelas, dan dua belas.

Dalam pasal tiga belas sendiri UU ini menjelaskan bahwa presiden memiliki kuasa penuh untuk membatalkan suatu kasus tertentu dan dapat membebaskan sementara terduga sebagai pelaku kejahatan sebelum yang bersangkutan diadili oleh Pengadilan Keamanan Negara. Kekuasaan Presiden Republik semakin besar dan leluasa dengan bunyi pasal empat belas dan lima belas yang berisikan tentang bagaimana Presiden memiliki kuasa untuk mengurangi, mengganti, dan membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan pada pelaku kejahatan sampai bisa pula untuk memerintahkan adanya pengadilan ulang atas suatu kasus tertentu (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

Saat proses berlangsungnya suatu pengadilan pada kasus tertentu Presiden Republik memiliki hak untuk mendelegasikan keputusannya melalui pengacara atau penasihat pengadilan dan bisa juga sifatnya menyampaikan pendapat saat berjalannya pengesahan putusan. Dalam menjalankan fungsinya pada UU darurat ini Presiden Republik memiliki hak juga untuk mengutus seseorang untuk menggantikan posisinya dalam sebagian atau semua kewenangannya yang telah

ditentukan pada UU ini di seluruh wilayah republik. Hal diatas tertulis secara detail pada pasal enam belas dan tujuh belas.

Berikutnya pada pasal delapan belas dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan UU ini tidak sedikitpun mengurangi hak dan kuasa yang dimiliki oleh komandan pasukan militer ketika terjadi peperangan yang berlangsung di daerah operasi militer tersebut. Pengadilan Keamanan Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang dirujuk pada mereka dan menjalankan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada UU ini meskipun keadaan darurat telah berakhir yang mana hal ini dijelaskan pada pasal sembilan belas UU darurat.

Dan dalam pasal terakhir di UU darurat ini menjelaskan bagaimana Presiden Republik memiliki hak dan kuasanya untuk dapat memutuskan mengadili kembali suatu kasus yang telah terjadi sebelumnya dan seluruh wewenang Presiden Republik pada seluruh pasal di UU darurat ini efektif tetap bisa dijalankan oleh presiden selama belum adanya penghapusan keadaan darurat yang mana ketentuan terkait berlaku dan berhentinya kondisi darurat ditetapkan langsung oleh Presiden Republik sendiri (International Center For-Not-For Profit Law 1962).

2.2.2 Pengangguran

Hal ini sudah terjadi sejak awal abad ke-18 yang mana ini menjadi satu dari banyak faktor utama lainnya yang harus dihadapi oleh pemerintah Mesir yang mana hal ini sendiri berangkat dari adanya sistem ekonomi yang terbuka disaat yang bersamaan pemerintah tidak menyiapkan konsep perekonomian untuk bisa bersaing.

Pada dekade 1960-an dimulai dengan adanya tanda lapangan pekerjaan yang sudah penuh dilihat dari persentase pengangguran hanya sebanyak 2,2% di tahun 1960 akan tetapi disaat yang bersama justru level tingkat produktivitas di posisi yang rendah dikarenakan terdapat faktor terlalu melimpahnya jumlah pegawai baik di pemerintahan maupun sektor publik yang hal ini dampak dari kebijakan yang dikemukakan oleh Sosialis Arab Nasser (Richard H. Adams 1986).

Pengangguran terbuka sendiri mulai terlihat kembali pada pertengahan 1970-an yang mana pada kondisi ini pengangguran levelnya naik menjadi 4,3% sesuai dengan data sensus di tahun 1976. Satu dekade berikutnya PDB mengalami peningkatan akan tetapi krisis ekonomi justru dimulai pada pertengahan tahun 1980-an yang mana pengangguran meningkat di level 11,1% sesuai dengan data sensus 1986 (Richard H. Adams 1986).

Masalah tidak berhenti disini melainkan selama periode satu dekade antara 1986 hingga 1996 timbul polemik berupa adanya investasi asing yang menurun ditambah dengan keadaan pengangguran yang masih belum kunjung bisa terselesaikan yang mana hal ini tercatat oleh sensus dengan kondisi pengangguran ada di angka 9%. Sesuai dengan data yang diperoleh oleh CAPMAS dan juga kementerian Tenaga Kerja jumlah pengangguran berubah menjadi di level 11,7% yang terjadi selama tahun 1997 hingga 2000 dengan jumlah rasio angka 1,5 juta warga yang saat itu sedang menganggur (Assad 2009).

Dampak dari kondisi ini membuat ratusan ribu warga Mesir yang akhirnya memilih untuk berpindah ke negara lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Sesuai dengan data yang tersaji bahwa selama satu dekade antara tahun 1998-1999 terjadi adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 523.000

jiwa yang mana untuk jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia hanya di angka 435.000 sehingga membuat sekitar 88.000 jiwa yang tersisa menjadi pengangguran (World Bank 2001).

Kondisi ini diperkirakan terus meningkat yang mana pada tahun 2001-2010 jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 2,6% yang bisa diakumulasikan bahwa jumlah pencari lapangan pekerjaan terus mengalami pertumbuhan di angka 638.000 per tahunnya yang mana hal ini tidak selaras dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia hanya di angka 435.000 saja. Hal ini tentu merupakan kondisi yang harus dipikirkan oleh pemerintah Mesir yang mana dapat kita asumsikan bahwa terdapat 896.000 jiwa yang membutuhkan pekerjaan di tahun 1999-2000an dengan kondisi 435.000 lapangan pekerjaan yang tersedia ditambah terdapat 90.000 jiwa yang memilih untuk mencari pekerjaan dengan berpindah ke negara lain sehingga menghasilkan penyerapan tenaga kerja sebesar 58,6% saja dan membuat 371.000 jiwa lainnya belum bisa mendapatkan pekerjaan (Noueir 2001).

Pada tahun 2006 angka rasio pengangguran menurun di 8,3% walaupun tetap dengan fakta bahwa warga Mesir yang saat itu bekerja tidak memiliki status pekerjaan yang tetap melainkan bergantung pada pekerjaan yang berjangka agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Kondisi ini sendiri diperparah dengan keadaan bahwa banyak orang tua yang akhirnya terpaksa harus mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolahnya untuk bisa membantu kondisi keuangan mereka (Assad 2009). Dan sesuai data terakhir menyebutkan bahwa di tahun 2009 angka pengangguran di Mesir sendiri mencapai 9% yang mana ini menunjukkan bahwa kondisi pengangguran justru mengalami peningkatan (Nassar 2011).

2.2.3 Kemiskinan

Mesir merupakan salah satu negara yang dianggap termiskin di kawasan Timur Tengah. Meskipun banyak sekali data yang tersaji baik dari laporan secara formal maupun informal akan tetapi dari keseluruhan data tersebut mengerucut pada suatu hasil yang sama yaitu Mesir merupakan negara yang miskin dan kemiskinan ini sendiri bertitik tengah pada pedesaan dengan 41,4% dan di daerah perkotaan dengan 6,6% (Mohamed 2013).

Sesuai dengan data yang dimiliki oleh PBB bahwa pada tahun 2005 terdapat sekitar 20% dari jumlah masyarakat Mesir yang hidup dibawah garis kemiskinan. Akan tetapi angka kemiskinan ini tidak kunjung bisa terselesaikan hingga tercatat pada tahun 2011 angka persentase penduduk Mesir yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat hingga 45% dari total penduduk (Owen 2011).

Fakta dari kemiskinan di Mesir ini tercermin pada kondisi dimana proses pembangunan negara yang tidak merata sehingga akhirnya menyebabkan orang kelas kaya menjadi semakin kaya dikarenakan dapat menguasai kekayaan yang dimiliki oleh negara serta dapat menikmati kelas hidup yang tinggi tersebut. Akan tetapi kondisi ini semakin tampak parah dikarenakan pada sekitar lingkungan orang kelas atas tadi terdapat mayoritas warga yang miskin hidup dalam kesusahan, suplai makanan yang tidak berlimpah, kondisi lingkungan tempat tinggal yang penuh dan berdesakan.

Tidak hanya itu saja melainkan warga kelas bawah ini juga tidak memiliki akses yang baik untuk menuju air bersih, fasilitas kesehatan yang baik secara kualitas, dan juga pendidikan yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan sampel data tahun 1995 yang menjelaskan bahwa 20% orang terkaya di Mesir bisa

menguasai sebesar 39% dari kekayaan negara dan 20% penduduk dengan kategori termiskin hanya bisa menguasai 9,8% dari total kekayaan negara (Haikel 1995).

Faktor yang membuat kemiskinan juga terjadi di Mesir adalah karena faktor geografis karena melihat secara sejarah bahwa daerah di bagian utara Mesir menerima lebih banyak perhatian oleh pemerintah Mesir sehingga pada daerah ini secara perekonomian bisa dinilai lebih makmur dibandingkan dengan bagian selatan Mesir yang mayoritasnya adalah pedesaan. Sesuai dengan data pada profil negara EIU pada tahun 2000-2001 yang mana hampir separuh dari sistem perekonomian dan sosial berpusat pada kota Kairo dan Alexandria (Roushdy and Assaad 2007).

Berikutnya adalah setelah kurang lebih sepuluh tahun Mesir mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak baik yaitu dengan rata-rata 4% antara tahun 1987-1995 perlahan perekonomian membaik dengan rata-rata yang mencapai 5,6% diantara tahun 1996-2000. Terlepas dari apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah Mesir akan tetapi angka kemiskinan Mesir masih saja tinggi yang mana salah satu bentuknya adalah adanya proporsi penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan primer atau bisa disebut dengan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh adanya inflasi yang melambung tinggi hingga pada titik 28,5% pada tahun 1989 tentunya permasalahan ini dikarenakan adanya pengurangan subsidi atas bahan pokok serta adanya kontrol anggaran pada fasilitas pelayanan publik sejak tahun 1991 (Kienle 2001).

Tidak hanya berhenti disitu saja melainkan sesuai dengan data yang disampaikan oleh World Bank bahwa angka kemiskinan pada tahun 2004/2005 yang berjumlah 19,6% meningkat menjadi 22% pada tahun 2008/2009 hal ini salah

satunya disebabkan oleh adanya inflasi yang meningkat drastis pada bahan makanan pada tahun 2008. Akan tetapi diluar sebab adanya inflasi yang meningkat terdapat pola pertumbuhan ekonomi yang berperan besar dalam mengabaikan kaum miskin sehingga membuat kelompok masyarakat miskin begitu rentan akan perubahan ekonomi ini sendiri (World Bank 2011).

Hal diatas adalah bukti bagaimana kemiskinan merupakan suatu hal yang sudah terjadi sejak lama akan tetapi pihak pemerintah Mesir tidak sanggup untuk benar-benar dapat mengatasi hal ini.

2.2.4 Aturan bersifat Otoriter

Negara mesir dikenal sejarah salah satunya adalah adanya kerajaan firaun yang mana diketahui bersama bahwa kepemimpinannya itu salah satu bentuk kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan pada masa itu yang ternyata masih dibawa sampai era Anwar Sadat hingga Hosni Mubarak. Suatu hal yang menarik adalah ketika Hosni Mubarak pernah menyampaikan bahwa dirinya akan menjadi presiden yang menyatakan dirinya sebagai punggawa demokrasi yang terkemuka.

Tidak hanya itu saja melainkan dirinya juga pernah menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu garansi terbaik demi masa depan bersama serta menyatakan pula bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk memonopoli pengambilan keputusan pada suatu kasus tertentu ditambah dirinya juga menyampaikan bahwa dirinya sangat tidak setuju pada aturan yang mengatur presiden memiliki masa/periode yang panjang. Perkataanya salah satunya terdapat pada tahun 1984 yang isinya bahwa dirinya sangat tidak setuju atas masa kepresidenan tidak boleh lewat dari dua periode ditambah juga dengan janjinya

akan menjadi presiden pertama yang akan tunduk pada aturan yang berlaku dan mendukung penuh untuk memberlakukan aturan terkait masa kepresidenan tidak lebih dari dua periode.

Akan tetapi semua tinggallah janji belaka yang disampaikan oleh Hosni Mubarak di hadapan warga Mesir pada saat itu karena justru pada faktanya adalah justru yang menyatakan berlaku UU darurat adalah Presiden yang menjabat itu sendiri. Contoh salah satu sikap yang dilakukan mantan presiden Anwar Sadat adalah dirinya juga tidak mendukung seseorang presiden memiliki masa kerja lebih dari dua periode yang tertuang pada pasal 77 UUD tahun 1971 akan tetapi justru yang dilakukannya adalah dengan mengubah UU di tahun 1980, yang mana terkait hal ini dirinya merubah bentuk UU sehingga presiden bisa menjabat lebih dari dua periode dan akhirnya memberikan kesempatan untuk dirinya bisa menjabat kembali sebagai presiden (Kassem 2004).

Setelah berhasil naik di kursi kepresidenan, Hosni Mubarak melakukan beberapa hal yang dapat memikat masyarakat di permulaan diantaranya adalah dengan membebaskan para tahanan politik yang saat itu sedang dalam penahanan dan membuka langkah rekonsiliasi nasional dengan memberlakukan proses liberalisasi politik yang mana sebelumnya faksi politik di Mesir telah terpolarisasi. Dengan menjalankan hal seperti ini membuat dirinya memenangkan hati masyarakat akan tetapi ini hanya berlaku beberapa tahun saja karena di tahun-tahun berikutnya Hosni Mubarak masih memberlakukan UU darurat dan selalu memperpanjang masa berlaku UU tersebut hingga dirinya lengser saat terjadinya Revolusi Mesir. Jelas dengan berlakunya UU ini dapat memberi kekuasaan besar untuk bisa melacak kelompok oposisi pemerintah menggunakan instrumen negara

yaitu polisi.

Sistem politik pada periode Hosni Mubarak membuat hubungan antara polisi dan aparat keamanan menjadi saling bersinergi yang mana apabila kedua alat ini gagal maka angkatan bersenjata akan langsung dengan sigap untuk menyelesaikannya. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa bagaimanapun alat keamanan diatas menjalankan perannya tetap dianggap sah dikarenakan mereka sedang melindungi pemerintah saat UU darurat diberlakukan. Tidak hanya para kelompok militan yang ditumpas melainkan para aktor sosial dan politik yang melakukan protes damai juga akhirnya ikut terkena penindasan dari alat keamanan negara ini sendiri (Cook 2007).

Kendali yang dimiliki oleh Hosni Mubarak bisa dikatakan sebagai pengendali sapu jagat yang mana dia merupakan panglima angkatan bersenjata, ketua partai politik yang saat itu berkuasa, kepala otoritas eksekutif, ketua dewan tertinggi kepolisian, dan juga ketua dewan peradilan tertinggi. Hal ini yang mengakibatkan semua kebijakan diputuskan oleh satu orang saja yaitu Hosni Mubarak sendiri sekalipun partai politik tidak ada peran.

Sehingga tidak heran apabila kekuasaan rezim Hosni Mubarak bisa mengawasi, mengontrol, serta membatasi gerak oposisi pemerintah. Maka dari itu beberapa partai politik akhirnya bisa eksis di tengah masyarakat Mesir sendiri juga melalui gugatan hukum yang mereka ajukan setelah mendapat penolakan oleh Komite Urusan Partai Politik. Jelas tampak bahwa komite ini berusaha menghambat adanya bentuk partai-partai baru lainnya (Handy 2000).

Rezim Hosni Mubarak sendiri juga akhirnya bisa menghancurkan konsep multipartai yang ada di Mesir. Rintangan dalam usaha untuk membangun sistem

multipartai ini terlihat ketika terdapat 24 partai politik yang sudah diakui sebelum revolusi bukan bentuk dari sistem multipartai seharusnya dikarenakan terdapat ketimpangan yang besar antara partai demokratik nasional (NDP) dengan partai politik sisanya. Ketergantungan finansial partai politik memiliki dampak negatif pada partainya sendiri dikarenakan independensi akhirnya yang menjadi taruhannya. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa adanya UU No. 1988 tahun 1986, UU No. 108 tahun 1992 dan UU No. 114 Tahun 1983 serta amandemen konstitusi di tahun 2005 dan 2007 yang mana adanya UU ini jadi melemahkan partai-partai lain (Fahmy 2002).

Salah satu faktor bahwa suatu negara tersebut menjadi negara yang demokratis adalah dimana suatu kelompok kepentingan memiliki independensi yang besar dari negara maka bisa dinilai bahwa negara tersebut semakin demokratis. Dalam hal ini apa yang ada di Mesir adalah beberapa diantaranya terdapat kelompok kepentingan seperti asosiasi bisnis, serikat pekerja, dan gerakan mahasiswa. Karakteristik hubungan yang dimiliki oleh negara dengan kelompok kepentingan di Mesir ditentukan oleh sifat asosiasi ini sendiri pada hal asal usul keanggotaan dan terkait bagaimana sikap mereka atas kebijakan yang diambil oleh negara.

Adapun kebijakan negara terhadap kelompok kepentingan/LSM misalnya tidak ada perubahan sejak tahun 1970-an yang mana negara memiliki kebijakan kontrol atas kelompok ini pada UU yang restriktif yang mana mereka benar-benar memantau secara ketat bagaimana organisasi ini bisa terbentuk sesuai dengan UU No. 153 Tahun 1999. Pada fungsi ini Kementerian Solidaritas Sosial memiliki fungsi untuk mengancam kegiatannya, merampas dana, membubarkan, serta

menggabungkan dua organisasi masuk menjadi satu organisasi. Tentu hal ini yang membuat pemerintah mengontrol segala kegiatan baik yang non-politik sehingga ruang untuk demokrasi benar-benar tidak terbuka sehingga menimbulkan perpaduan hukum yang otoriter (Kassem 2004).

2.2.5 Korupsi

Beberapa pakar yang memahami sistem pemerintahan di Mesir sepakat bahwa korupsi adalah suatu sistem terkuat di Mesir. Terjadinya korupsi ini sendiri salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan dari badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa struktur administrasi pada eselon bawah karena memang korupsi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur kerja di beberapa lembaga milik negara. Alasan lain berikutnya adalah karena adanya keikutsertaan pejabat tinggi politik dan administrasi negara yang juga berkecimpung dalam praktik korupsi ini sendiri.

Sesuai dengan data yang ada bahwa pada 2010 yang dilaporkan oleh Transparency International bahwa Mesir masuk kedalam peringkat ke-105 pada tingkat 178 negara yang ada di dunia dengan skor 3.1 yang mana jika hasil skor >5 maka negara tersebut semakin bersih atau jauh dari korupsi dan <5 maka hal ini mengindikasikan negara itu sangat korup yang telah dinilai oleh beberapa komponen dasar faktor korup ini sendiri (Transparency International 2010).

Keadaan ini yang akhirnya digunakan oleh beberapa kelompok sosial untuk menggunakan pengaruh mereka pada beberapa lembaga negara, memanfaatkan hubungan ini untuk mencari keuntungan dari praktik ilegal seperti menjual bahan makanan yang kadaluwarsa dan penghindaran dari adanya bea cukai atas barang.

Praktik perampasan dana negara sudah menjadi salah satu asal kekayaan terbesar para koruptor (Amin 2009, 2-16).

Praktik korupsi ini sendiri di Mesir juga telah menjadi suatu kewajaran umum yang sangat tidak terelakkan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat pemerintahan daerah. Karena korupsi ini sudah menjadi sistem yang menjadi wajar maka tidak hanya lembaga pemerintahan saja yang melekat akan praktik korupsi melainkan entitas non-pemerintah baik itu seperti partai, kelompok kepentingan, dan organisasi sukarela juga tidak luput dari adanya praktik korupsi didalam tubuhnya (Amin 2009, 34).

Hal diatas inilah yang akhirnya membuat kemarahan warga berstatus miskin di Mesir karena mereka telah merasakan frustasi yang amat dalam karena dengan adanya praktik korupsi yang terjadi pada banyak lini kehidupan baik pemerintah dan non-pemerintah membuat sumber daya negara habis sehingga pembangunan tidak berjalan dengan semestinya, kesenjangan sosial semakin besar jaraknya, dan perekonomian yang tentunya mengalami kesenjangan yang semakin lebar.

2.2.6 Manipulasi Pemilu

Pemilihan langsung sudah seharusnya berjalan dengan norma-normanya baik itu adil, jujur, dan sebagainya. Akan tetapi jika praktik pemilu ada beberapa hal yang membuat tidak berjalan adil maka ini mengindikasikan bahwa tuntutan rakyat tidak sampai kepada para pembuat kebijakan sehingga ini yang mengakibatkan cepat atau lambat rakyat akan mencari cara bagaimana mereka bisa menyuarkan tuntutannya yang akhirnya bisa jadi terjadi sebuah revolusi.

Hal ini terjadi pada pemilihan umum parlemen pada tahun 1984 yang mana ini adalah pemilu pertama kali dalam sejarah Mesir sesuai dengan sistem pemilihan perwakilan yang proporsional. Dalam pemilu ini sendiri terdapat lima partai politik yang ikut bertarung didalamnya yaitu Partai Liberal (LP), Partai Persatuan Progresif Nasionalis (NPUP), NWP, SLP, dan Partai Demokrasi Nasional (NDP). Dalam berjalannya proses pemilu Hosni Mubarak memberikan kesempatan dan izin bagi pemerintahannya untuk melakukan mobilisasi birokrasi negara yang besar sehingga bisa menghasilkan kemenangan bagi NDP dalam ajang kontestasi ini sendiri. Dan akhirnya pada pengumuman hasil NDP sendiri mendapat kemenangan dengan 87% suara dengan 58 kursi yang tidak terpilih dari 448 jatah kursi yang tersedia (Hilal 1986).

Berikutnya adalah ketika pemilu parlementer kedua yang berlangsung pada tahun 1987 sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa UU pemilu tidak konstitusional. Dari hasil akhir pemilu tahun 1987 ini dinyatakan bahwa jumlah kursi yang akhirnya bisa dimenangkan oleh oposisi meningkat yang sebelumnya hanya 13% pada pemilu 1984 meningkat menjadi 22,32% yang akhirnya membuat jumlah porsi kursi bagi partai berkuasa menurun menjadi 77,78% pada pemilu ini. Hal ini jelas membuat adanya pengakuan secara *de facto* mengenai bagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin dan Marxis Mesir sulit untuk bisa memiliki kekuatan melawan partai berkuasa yaitu NDP. Akan tetapi pada pemilu di tahun 1987 para partai politik oposisi tetap merasakan adanya ketidakadilan dalam proses pemilu parlementer, memprotes terkait berlakunya UU pemilu, dan juga mengeluhkan tentang adanya tekanan dari pemerintah selama berlangsungnya pemilu ini sendiri (Makram-Ebeid 1989).

Atas pemilu legislatif berikutnya pun yang berlangsung pada tahun 1990 dan tahun 1995 sendiri pihak partai oposisi mengeluhkan terkait hal yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1987. Hal ini yang akhirnya membuat pihak Mahkamah Agung Konstitusi memutuskan di tahun 2000 bahwa pada kedua pemilu legislatif (tahun 1990 dan 1995) dinyatakan telah melanggar hukum dikarenakan saat itu Partai NDP selaku partai petahana melakukan tindakan-tindakan ilegal dengan tujuan untuk memenangkan pemilu yang didalamnya beserta berbagai kecurangan. Hal ini disusul dengan keputusan pengadilan Mesir yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi alasan untuk menyelesaikan proses pemilu hanya dalam sehari yang hal ini disertai dengan keputusan Mahkamah Konstitusional telah membatalkan UU tahun 1999 terkait adanya pembatasan pemantau pemilu dari pihak lembaga swadaya masyarakat.

Selanjutnya adalah pada pemilu parlemen yang berlangsung di tahun 2000 yang mana pemilu ini benar-benar diawasi langsung oleh Komisi Yudisial Mesir akan tetapi seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang mana partai NDP selalu memenangi hasil akhir pemilu dengan perolehan suara paling banyak yaitu dengan persentase 87,8% dengan perbandingan 388 dari 454 kursi yang tersedia. Untuk sisanya sendiri dibagi untuk Partai Nasserites dengan tiga kursi, Partai NPUP dengan enam kursi, Partai NWP dengan tujuh kursi, Partai LP hanya satu kursi saja dan sisanya sebanyak 37 kursi dimenangkan oleh independen tanpa partai politik (Mohamed 2013).

Sedangkan untuk pemilu parlemen di tahun 2005 sendiri seperti yang sudah bisa dapat diketahui bahwa pada babak ini lagi-lagi Partai NDP bisa memenangkan sebanyak 311 kursi yang sisanya sebanyak 88 kursi lainnya dimenangkan oleh

anggota Ikhwanul Muslimin. Hal ini yang akhirnya membuat kinerja serta efisiensi rezim yang dibangun oleh Hosni Mubarak perlahan kentara dengan fakta bahwa masalah pembangunan Mesir tidak kunjung usai sehingga proses akan adanya manipulasi pemilu di tahun 2005 ini juga semakin jelas terjadi (Mohamed 2013).

Terkait pemilu presiden yang terjadi di tahun 2005 sendiri juga terdapat beberapa hal yang semakin menunjukkan bahwa pengaruh Hosni Mubarak sebagai presiden tidak terelakkan. Di tahun ini juga terjadi referendum nasional di Mesir yang mana harapannya dengan hal ini membuat pengaruh otoritarianisme semakin memudar dan perlahan menuju negara yang semakin demokratis. Akan tetapi yang akhirnya sangat disayangkan adalah pada referendum hanya menitikpusatkan pada pasal 76 konstitusi yang mengatur tentang kemungkinan banyaknya kandidat yang bisa maju dalam kontestasi bursa pemilihan presiden. Dalam hal ini sendiri terdapat dua kondisi yang harus diperhatikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Mesir memiliki wewenang untuk menilai para peserta calon presiden dan bisa mendiskualifikasi peserta yang diinginkan (Recknagel 2005).

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah untuk pemilu presiden di tahun 2011 nantinya setiap partai yang akan mengusung calon presiden harus memiliki 5% kursi di parlemen saat pemilu 2005 dan harus sudah eksis selama lima tahun lamanya. Tentu hal ini yang membuat partai politik baru akan menjadi kesulitan untuk dapat bersaing dalam pemilu tersebut. Akhirnya ketika pemilu presiden tahun 2005 berjalan rakyat Mesir memilih calon presiden yang mereka inginkan akan tetapi hasil akhir dari pemilu ini sendiri sudah bisa ditebak yang mana akhirnya tetap dimenangkan oleh Hosni Mubarak dengan 88,6% suara (Williams and Wright 2005).

Terlihat dari kondisi ini bahwa pengaruh otoriter dari Hosni Mubarak untuk memobilisasi gerakan Partai NDP membuat mereka bisa memenangkan Hosni Mubarak kembali untuk yang kelima kalinya sebagai presiden. Sehingga dengan data yang tersaji sebelumnya sudah terlihat bagaimana rezim Hosni Mubarak juga melakukan praktik manipulasi pemilu agar kedigdayaan mereka bertahan lama.

2.3 Faktor Kekerasan Langsung

2.3.1 25 Januari 2011 – 11 Februari 2011

Seperti yang sudah dijelaskan sedikit pada bab sebelumnya bahwa selama berlangsungnya Revolusi Mesir di tahun 2011 antara tanggal 25 Januari-11 Februari 2011 terjadi kekerasan yang menimbulkan banyak korban berjatuhan. Sesuai dengan data yang ada bahwa terdapat 846 jiwa meninggal dunia dan 6.467 jiwa alami luka-luka dengan beragam tingkatan. Data ini sendiri diperoleh langsung dari Kepala Sektor Kedokteran di Kementerian Kesehatan Mesir (M. A. Abdelmottlep 2015).

Korban yang berjatuhan ini disebabkan oleh sewenang-wenangnya aparat keamanan dalam menggunakan hak dan kuasanya saat menertibkan massa demonstran. Disini aparat keamanan menggunakan senapan, peluru karet, peluru tajam, bahkan penembak jitu untuk menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu melainkan aparat keamanan juga menggunakan kendaraan lapis baja untuk menertibkan dengan menabrak para demonstran hingga terbunuh.

Oleh karena itu terdapat laporan medis yang melaporkan bahwa korban berjatuhan banyak ditemukan pada tubuhnya luka pada bagian leher, kepala, dan dada yang diakibatkan dari luka tembak. Padahal sesuai dengan peraturan yang

mengatur aparat keamanan dalam menggunakan senjata api seperti UU No.109 tahun 1971, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.139 tahun 1955, dan No.156 tahun 1964 sudah ditetapkan terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Langkah ini seperti harus adanya upaya persuasif terlebih dahulu kepada para demonstran yang mana jika tidak diindahkan penggunaan gas air mata baru diizinkan dan apabila hal ini juga tidak berpengaruh tembakan peringatan harus dijalankan terlebih dahulu sebelum menembakkan senjata ke arah para demonstran. Tembakan ini pun harus mengarah ke bagian kaki saja dan tidak boleh diarahkan ke selain bagian kaki (M. A. Abdelmottlep 2015).

Sehingga dengan temuan fakta bahwa luka tembak yang ditemukan pada tubuh korban demonstran mayoritas tidak pada bagian kaki dan justru pada bagian atas tubuh membuat keyakinan bahwa dalam hal ini aparat keamanan bertindak sewenang-wenang. Kondisi ini terjadi di banyak provinsi di Mesir seperti Suez, Alexandria, Bani Suef, Dakahlia, Qalubia, Al-Buhaira, Mesir Barat, Mesir Timur, dan Damiett.

2.3.2 Pasca 11 Februari 2011

Kepolisian di tahap ini sudah dinilai oleh masyarakat bukan lagi sebagai pelindung masyarakat melainkan seperti kumpulan gangster yang berusaha menjatuhkan hukuman kolektif pada daerah yang sedang bergejolak. Oleh karena itu aparat keamanan justru menjadi musuh masyarakat yang nyata dan berbekal dengan senjata. Harapan terjadinya reformasi di tubuh kepolisian tidak kunjung menjadi kenyataan pasca apa yang terjadi antara 25 Januari -11 Februari 2011. Kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian

bahwa mereka justru yang menjadi korban akibat dari serangan terus menerus pihak anti pemerintah (Fadel 2013).

Seorang inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi, Ennarah menyampaikan bahwa kurang lebih terdapat 60 orang tewas dalam bentrok dengan pihak kepolisian yang terjadi selama beberapa bulan saja setelah Revolusi Mesir. Dirinya mengatakan “Sangat jelas bagi saya bahwa mereka percaya bahwa mereka sedang berkonflik dengan penduduk. Dan mereka hanya ingin dipersenjatai sepenuhnya dan memiliki lebih sedikit peraturan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan kekerasan dan senjata api.” (Fadel 2013).

Pada bulan Desember tahun yang sama terdapat kasus polisi yang terbunuh di Kota Minya akan tetapi disini justru polisi menggunakan kekuasaannya dengan meneror seluruh lingkungan tersebut dan menembak seorang gadis berumur 9 tahun. Selanjutnya terdapat kasus seorang polisi tewas di Suez dan polisi membalasnya dengan melakukan penembakan sembarangan dan akhirnya menewaskan sembilan orang. Dan satu lagi apa yang terjadi di Port Said Terusan Suez dimana terdapat bentrokan terjadi dan justru menewaskan 40 orang termasuk lima orang polisi didalamnya (Fadel 2013).

BAB III

ANALISIS KEKERASAN YANG TERJADI

3.1 Kekerasan Kultural

Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Galtung bahwa kekerasan kultural merupakan sebuah alat yang sering dijadikan legitimasi untuk sebuah tindakan kejahatan baik secara struktural maupun langsung. Oleh karena itu kekerasan bentuk ini membuat suatu bentuk kekerasan terlihat biasa dan bahkan menjadi sebuah hal yang dinilai normal. Tidak luput analogi permainan warna yang mana sebenarnya sebuah kekerasan ditandai dengan warna hitam justru menjadi terlihat berwarna abu-abu karena titik kekerasan sesungguhnya sudah terkaburkan dengan sempurna (Galtung 1990, 291).

Hal ini menjadi nyata jika melihat poin pemusatan kekuasaan Partai NDP yang mana ini menjadi sebuah bentuk kekerasan kultural. Dapat dinilai sebagai bentuk kekerasan ini dikarenakan Partai NDP menjadikan kekuasaan mereka sebagai alat legitimasi kekerasan yang mereka perbuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kekuasaan yang mereka miliki ini membuat mereka berani untuk melakukan manipulasi pemilu. Hal ini dikarenakan juga adanya faktor Hosni Mubarak yang juga menjadi ketua Partai NDP sehingga langkah partai ini menjadi lebih dipermudah secara mobilitas.

Sesuai dengan data yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa terkait hal ini Mahkamah Agung Konstitusi Mesir sendiri di tahun 2000 menyatakan bahwa pada pemilu di tahun 1990 dan 1995 Partai NDP dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan bentuk-bentuk pelanggaran berupa kecurangan dan tindakan-tindakan ilegal lainnya. Sehingga disini sudah terbukti memang bahwa dengan adanya pemusatan kekuasaan Partai NDP ini justru membuat mereka bisa

melakukan tindakan yang melanggar hukum (Mohamed 2013).

Pemusatan kekuasaan Partai NDP ini sendiri masuk kedalam kekerasan kultural ideologi. Hal ini sesuai dengan upaya yang mereka lakukan untuk bagaimana memberi pengaruh luar biasa pada warga Mesir lainnya terkait pengaruh dari kekuasaan Partai NDP ini sendiri.

Berikutnya adalah dominasi militer dalam sistem sosial politik masyarakat yang juga masuk kedalam bagian kekerasan kultural. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana militer sejak tahun 1952 hingga bahkan kepemimpinan Hosni Mubarak masih selalu melakukan dominasi di pemerintahan melalui jalur militer. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesuai data yang tersaji pada bab sebelumnya bahwa dengan kekuatan militer di beberapa tahun bidang ekonomi mengalami kemajuan (Al-Rahman 1977).

Akan tetapi juga tidak menutupi fakta dengan kekerasan militer ini juga membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan kondisi penuh dengan kewaspadaan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh warga Mesir yaitu Muhammad Mansour “Pos pemeriksaan adalah hal biasa, tetapi meskipun anda dihentikan, anda tidak takut. Itu hanya rutinitas dan kemudian anda akan melewatinya” (Mansour 2017). Terlihat dari pernyataan ini bahwa kondisi warga Mesir hidup dengan penuh kewaspadaan menjadi hal lumrah. Kekerasan bentuk ini sendiri masuk kedalam golongan kekerasan kultural ideologi dikarenakan kekerasan ini berusaha masuk ke kehidupan warga Mesir sehingga membuat pemikiran baru bahwa mereka hidup dengan penuh kewaspadaan merupakan hal yang lumrah.

Terakhir yaitu aliansi aktor keagamaan dengan politisi elit disini juga masuk pada bagian kekerasan kultural. Sesuai dengan data yang sudah tersampaikan pada

bab sebelumnya bahwa terdapat aktor keagamaan yang justru menggunakan dalil agama untuk melegitimasi kebijakan pemerintahan sekalipun itu menyimpang dari ajaran agama. Hal ini masuk ke dalam bagian kekerasan kultural agama dikarenakan agama disini telah menjadi alat pembenaran bagi pemimpin negara.

Hal ini seperti apa yang dikatakan Ali Gomaa seorang Mufti Mesir yang mengatakan bahwa bagi warga Mesir memiliki kewajiban untuk patuh kepada Presiden Mesir al-Sisi karena jika tidak patuh termasuk pada golongan orang yang tidak patuh pula pada Nabi Muhammad *-Shalallahu alaihi wassalam-* (Al-Youm 2015).

3.2 Kekerasan Struktural

Pada bagian ini penulis berusaha menganalisis terkait kekerasan struktural yang terjadi di Mesir selama rezim Hosni Mubarak memimpin. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kekerasan struktural ini merupakan suatu bentuk kekerasan yang mana target dari kekerasan ini salah satunya adalah mencederai kebutuhan primer dari masyarakat. Akan tetapi pelaku dari kekerasan ini sangat sulit untuk dapat diidentifikasi dikarenakan secara pola kekerasan ini sudah terstruktur secara rapih (Galtung 1990, 293).

Hosni Mubarak dirinya menjabat sebagai presiden sekaligus panglima angkatan bersenjata, kepala otoritas eksekutif, ketua dewan tertinggi kepolisian, ketua dewan peradilan tertinggi, dan juga ketua dari partai yang berkuasa membuat dirinya kian tidak tersentuh. Oleh karena itu dengan kondisi ini membuat kekerasan struktural bisa terjadi di Mesir dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah hal tersebut (Handy 2000).

Sesuai dengan data-data yang sudah terlampir pada bab sebelumnya dapat dianalisis bahwa kekerasan struktural ini bisa mencakup poin pemberlakuan UU darurat, kemiskinan, korupsi, aturan yang otoriter, pemilu yang dimanipulasi, dan pengangguran. Sesuai pada pembahasan di bab sebelumnya bahwa UU darurat disini menjadi sebuah bentuk kekerasan struktural dikarenakan dengan adanya pemberlakuan UU darurat ini membuat warga Mesir terancam kebebasannya. Dalam implementasinya sendiri UU darurat ini mengakibatkan banyaknya korban yaitu sesuai dengan data bahwa terdapat 5.000-10.000 jiwa yang dipenjara akibat UU ini sendiri (Amnesty International 2010). Oleh karena itu kekerasan ini masuk kedalam kategori kekerasan struktural *freedom needs*.

Berikutnya kemiskinan yang terjadi di Mesir salah satunya dikarenakan terdapat pembangunan yang tidak merata antara Mesir di bagian utara seperti Kairo dan Alexandria dan negara Mesir bagian selatan yang isinya didominasi oleh pedesaan tidak seperti di bagian utara (Roushdy and Assaad 2007). Peran pemerintah yang seharusnya bisa mengakomodir pembangunan yang merata di seluruh daerah pada poin ini telah gagal dicapai. Berikut gambaran bagaimana ketimpangan terjadi di Mesir dari data pada tahun 2005 (Verme, et al. 2014):

Tabel 1.1 Kesenjangan antara perkotaan-pedesaan di Mesir (di semua daerah)

	Masyarakat Perkotaan	Masyarakat Pedesaan
Rata-rata pendapatan per kapita (USD)	1.294	0.775
Pangsa populasi (dalam %)	43.4	56.6
Bagian dari total pendapatan (dalam %)	56.1	43.9
Ketimpangan (Koefisien Gini)	37.5 (0.3)	26.5 (0.2)

2 0. Kesenjangan antara perkotaan-pedesaan di Mesir (di semua daerah)

Catatan : Koefisien Gini jika bernilai 0 maka menunjukkan kesetaraan sempurna (seluruh penduduk memiliki jumlah pendapatan yang sama) dan jika diatas 0 maka kondisi tersebut semakin tidak setara.

Dari data diatas dapat dilihat bersama bahwa masyarakat Mesir yang tinggal di perkotaan memiliki rata-rata pendapatan per kapita dua kali lipat lebih besar dibandingkan masyarakat yang tinggal di pedesaan pada negara Mesir. Ini menunjukkan juga bahwa berkat pembangunan yang tidak merata tersebut mengakibatkan kemiskinan yang akhirnya harus dirasakan oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Oleh karena itu dalam hal ini kemiskinan ini masuk kedalam kategori kekerasan struktural *well-being needs*.

Tindakan korupsi juga menjadi salah satu hal yang masuk kedalam kekerasan struktural karena dengan adanya praktik-praktik korupsi yang terjadi di suatu negara membuat alokasi anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya untuk kemajuan negara menjadi terkuras dan berujung masuk pada kantong-kantong pribadi sehingga menimbulkan kekurangan atas pemenuhan hak masyarakat yang sudah semestinya terwujud sempurna (Ifrani 2017). Sehingga dengan kondisi ini bisa dinyatakan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang jurnalis bernama Aladdin El-Asaar yang mengungkapkan bahwa total kekayaan Hosni Mubarak dan keluarga berjumlah 50 hingga 70 juta USD. Selain itu terdapat Ahmed Ezz sebagai mantan sekretaris di Partai NDP dengan total kekayaan 18 juta pound Mesir, Ahmed Al-Maghraby sebagai menteri perumahan dengan total 11 juta pound Mesir, dan Zuhair Garana sebagai menteri pariwisata dengan total 13 juta pound Mesir (Khasyi'in

2019).

Ketiga tokoh Mesir diatas dengan nyata dijatuhi hukuman dan dipenjara. Ahmed Ezz dengan kasus melanggar aturan dan izin mendirikan pabrik rumah militer dan baja yang mana dengan kekuasaan Mubarak dirinya memonopoli industri baja di Mesir sebesar 60%. Al-Maghraby sendiri dijatuhi hukuman karena dirinya yang menyiapkan alokasi ruang sebesar 113 hektar di kawasan elit pada pinggiran Kairo. Dan terakhir Zuhair Garana yang dipenjara karena adanya upaya penghindaran dari penerapan izin untuk bisnis. Ketiganya ini dianggap melakukan tindakan korupsi dan pemborosan anggaran publik dalam masing-masing kasusnya (Swamurti 2011).

Seperti data yang sudah tersampaikan pada bab sebelumnya bahwa tingkat korupsi di Mesir pada tahun 2010 memiliki skala 3.1 yang mana jika skor ini masuk pada skala >5 maka negara tersebut bisa dinyatakan sebagai negara yang bersih atau sedikit terjadi kasus korupsi akan tetapi jika memiliki skala <5 maka negara tersebut dapat dinyatakan sebagai negara yang memiliki kasus korupsi dengan jumlah yang banyak (Transparency International 2010).

Sehingga disini penulis memasukkan poin korupsi masuk kedalam bentuk kekerasan struktural *well-being needs* karena dengan adanya praktik korupsi proses perkembangan negara yang seharusnya menjadi sebuah hak untuk dinikmati oleh masyarakat suatu negara seperti adanya fasilitas terbaik, pelayanan negara pada warga dengan optimal, dan perlindungan yang utuh secara maksimal tentu akan terkendala. Bahkan korupsi ini sendiri dapat dinyatakan sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia (Pratama 2019).

Bentuk berikutnya dalam kekerasan struktural yang terjadi di masa rezim Hosni Mubarak adalah adanya aturan yang otoriter seperti UU No. 108 tahun 1992, No. 114 tahun 1983, serta amandemen konstitusi pada tahun 2005 dan 2007 yang dibentuk untuk melemahkan partai politik selain dari Partai NDP selaku partai petahana (Fahmy 2002). Semua aturan yang otoriter ini bermula ketika Hosni Mubarak memberlakukan UU darurat No.162 tahun 1958 di permulaan ketika dirinya menjabat sebagai presiden setelah kematian presiden Mesir sebelumnya yaitu Anwar Sadat (International Commissions of Jurist 2009). Seperti yang dipahami bahwa makna otoriter ini sendiri adalah suatu bentuk perbuatan atau tindak laku sewenang-wenang yang pelakunya disini adalah orang yang berkuasa terhadap apa yang dikuasainya (Anjar Mahmudin NST 2021).

Tindakan otoriter yang dilakukan oleh Hosni Mubarak selama dirinya menjabat sebagai presiden tidak hanya sekali atau dua kali saja melainkan seringkali sudah terjadi. Dimulai ketika dirinya secara mengejutkan membebaskan para tahanan politik yang dipenjara saat era kepresidenan Sadat kemudian dilanjutkan dengan membuka langkah rekonsiliasi nasional pada awal masa kepemimpinannya yang mana ini dilakukannya untuk mendapatkan hati dari masyarakat Mesir di permulaan.

Akan tetapi langkah seperti ini dari Hosni Mubarak ini hanya berjalan sebentar saja karena setelahnya dirinya terus memperbarui UU darurat untuk diberlakukan tiap tiga tahun sekali. Polisi dan aparat keamanan menjadi senjata penting bagi Mubarak untuk menertibkan para oposannya. Dengan dua instrumen diatas dirinya bisa melacak posisi para kelompok oposisi untuk dapat sewaktu-waktu apabila kondisi pemerintahan berguncang akibat peran oposan tersebut maka

dengan mudah Mubarak memberi instruksi untuk menangkap mereka (Cook 2007).

Sesuai dengan data yang sudah tertulis pada bab sebelumnya bahwa dengan dibetuknya UU No.153 tahun 1999 juga akhirnya yang membuat kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sulit untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat berkat adanya pengawasan ketat terkait bagaimana suatu kelompok ini berkembang. Terlihat disini bahwa dengan kondisi-kondisi diatas baik masyarakat, lembaga pemerintah ataupun organisasi non-pemerintah benar-benar dibawah naungan aturan otoriter (Kassem 2004).

Berkat aturan-aturan otoriter yang diterapkan oleh Mubarak tentu membuat hak yang semestinya diraih oleh masyarakat Mesir misal seperti hak untuk berekspresi, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak lainnya yang sudah seharusnya didapatkan menjadi sukar untuk tercipta. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh kelompok gabungan para pengacara Mesir dan organisasi hak asasi manusia bahwa terdapat kurang lebih antara 5.000 sampai 10.000 orang yang telah dipenjara tanpa adanya dakwaan dan keterangan yang jelas (Amnesty International 2010). Kondisi diatas ini menjelaskan bahwa hal ini masuk kedalam kekerasan struktural *freedom needs*.

Tidak tertinggal pula berikutnya yaitu pengangguran yang masuk dalam bagian kejahatan struktural ini sendiri. Hal ini sudah tentu masuk dalam faktor kekerasan struktural dikarenakan penyediaan lapangan kerja sudah semestinya masuk pada kewajiban negara karena dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sangat memungkinkan nantinya akan membentuk kejahatan lainnya seperti adanya perampokan, kriminalitas yang meningkat, dan beragam kejahatan lainnya (Lee 2019).

Dalam hal ini pengangguran menjadi salah satu momok yang sulit untuk bisa diselesaikan oleh pemerintah Mesir dari tahun ke tahun. Terungkap data yang disampaikan oleh Dominique Strauss-Kahn sebagai direktur pelaksana IMF mengatakan di awal tahun 2011 bahwa pengangguran di Mesir meningkat secara berbahaya yang mana ini didominasi oleh golongan muda Mesir. Kondisi ini akan dapat menjadi bom waktu apabila pemerintah Mesir tidak bisa segera menemukan solusi dari kendala ini sendiri. Pihak IMF sendiri juga mengatakan bahwa diperkirakan kurang lebih sebanyak 10 juta lapangan pekerjaan dibutuhkan di Mesir. Kondisi ini semakin dipertebal oleh pernyataan Ratna Sahay dan Alan MacArthur sebagai pejabat IMF regional yang menyampaikan bahwa kondisi pengangguran sudah terlalu tinggi dan mereka menganggap sudah semestinya pihak pemerintah untuk memperbanyak pekerjaan padat karya agar bisa menyerap lebih banyak pekerja didalamnya (Al Jazeera 2011). Oleh karena itu bentuk kekerasan ini masuk kedalam kategori kekerasan struktural *survival needs*.

Pemilu yang dimanipulasi juga tidak lupa untuk masuk kedalam kekerasan struktural ini juga, dikarenakan kondisi yang tidak semestinya justru ditampilkan oleh pemerintah sehingga masyarakat Mesir terkelabui. Sesuai dengan data yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa dalam proses berlangsungnya pemilu parlementer dan presiden di Mesir, Mubarak menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk memberikan jalan bagi Partai NDP guna bisa memobilisasi pergerakan yang mereka inginkan agar pemilu dapat dengan mudah mereka menangkan. Hal ini sendiri sesuai dengan kritik bahwa Komisi Pemilihan Nasional merupakan sebuah alat pelayan Mubarak dan juga Partai NDP dikarenakan pihak komisi pemilihan pada proses pemilu presiden 2005 mereka telah mendiskualifikasi

sebanyak 20 calon presiden termasuk didalamnya para calon yang dapat membuat persaingan perebutan kursi presiden menjadi kompetitif. Dalam hal ini seperti Taalat Sadat seorang keponakan Anwar Sadat dan calon dari kelompok Ikhwanul Muslimin dilarang untuk mencalonkan diri di pemilu. Sehingga ada gerakan dari beberapa partai oposisi termasuk didalamnya Partai Nasserist dan Partai Tagammu mengajukan protes terhadap pemilu ini dikarenakan mereka mensinyalir adanya penipuan dan tindak kecurangan dalam proses pemilu. Alasan adanya kecurigaan adanya kecurangan ini dikarenakan salah satunya adanya petugas pemantau proses pemilu dari internasional yang tidak diberi izin untuk mengawasi jalannya pemilu ditambah proses referendum sebelumnya dan pemilu parlemen di tahun yang sama secara gamblang sudah terlihat korup (Mohamed 2013). Oleh karena itu kekerasan ini sesuai dengan kategori kekerasan struktural *freedom needs*.

3.3 Kekerasan Langsung

Bentuk dan apa yang terjadi dari kekerasan langsung yang terjadi pada Revolusi Mesir di tahun 2011 ini merupakan bagian dari tiga rangkaian kekerasan yang dibuat oleh Galtung dalam menggambarkan konsep teori segitiga kekerasan seperti yang tergambar pada bab sebelumnya di poin gambar 1.1. Sesuai dengan penjelasan dari Galtung bahwa kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang mana antara pelaku dan korban pada kasus ini sudah terlihat secara jelas (Galtung 1990, 292).

Oleh karena itu kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan saat revolusi Mesir antara 25 Januari hingga 11 Februari 2011 merupakan bentuk yang dapat diklasifikasikan masuk kedalam kekerasan langsung. Dalam hal ini aparat

keamanan dibawah kontrol langsung oleh Habib Al-Adli selaku Menteri Dalam Negeri justru digunakan untuk melakukan tindakan yang menyimpang berupa perlindungan atas koruptor seperti Ahmed Ezz, Ahmed Al-Maghrabi, dan Zuhair Garana yang dengan jelas dilindungi oleh pihak aparat keamanan. Tidak hanya itu melainkan Habib Al-Adli melakukan pembiaran pada aksi aparat keamanan seperti adanya pelecehan dan penyiksaan sehingga membuat mereka tidak mempedulikan atas terjadinya kasus seperti pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, penyerangan, dan lain sebagainya yang mana kondisi ini membuat masyarakat Mesir yang tidak percaya lagi pada sistem keamanan negara (M. A. Abdelmottlep 2015).

Berangkat dari kondisi aparat keamanan yang menggunakan kuasanya sewenang-wenang membuat banyak masyarakat Mesir harus kehilangan saudara, ayah, ibu, ataupun keluarganya saat terjadinya Revolusi Mesir di 2011. Hal diatas dapat terjadi dikarenakan aparat keamanan dalam mengamankan para demonstran menggunakan senapan, peluru karet, peluru tajam, serta menggunakan penembak jitu yang diposisikan di atap gedung-gedung. Sehingga terdapat laporan yang menyampaikan bahwa faktor kematian yang terjadi pada para demonstran dikarenakan adanya luka pada leher, kepala, dan dada yang diakibatkan dari peluru tajam sehingga membuat luka tembak.

Dalam hal ini aparat keamanan tidak memiliki otorisasi untuk dapat menggunakan jenis-jenis senjata seperti diatas jika tidak memiliki izin dan perintah dari sebuah komite yang diketuai Menteri Dalam Negeri dan berisi para pejabat senior kementerian. Tidak hanya itu melainkan kendaraan lapis baja juga dikerahkan yang akhirnya membuat banyak demonstran terbunuh dan luka-luka.

Bahkan terdapat rekaman video yang menunjukkan bahwa kendaraan diatas terlihat digunakan untuk menabrak dan membunuh para demonstran langsung ditempat. Dari banyak laporan yang diterima bahwa jumlah korban yang terbunuh dalam tragedi revolusi Mesir 2011 ini berjumlah 846 jiwa dan 189 jiwa lainnya meninggal di penjara. Dan dari diatas dilaporkan pula terdapat 6.467 jiwa luka-luka dari beragam tingkatan dan 263 jiwa luka-luka didalam penjara (M. A. Abdelmottlep 2015).

Kendati demikian dalam UU negara Mesir terdapat aturan yang mengatur penggunaan senjata api dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat keamanan seperti yang diatur pada UU No. 109 tahun 1971 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 139 Tahun 1955 dan No. 156 Tahun 1964. Dalam peraturan diatas sudah tertuang bahwa otoritas yang berhak mengeluarkan izin untuk bisa menggunakan senjata dalam mengamankan kerusuhan dan demonstrasi hanya melalui Menteri Dalam Negeri yang berikutnya diinstruksikan kepada kepolisian. Hal itupun hanya boleh dilakukan ketika upaya persuasif seperti peringatan tidak dindahkan, penggunaan gas air mata tidak berpengaruh, dan tembakan peringatan juga tidak memberikan efek. Terkait penggunaan senjata juga harus diarahkan sehingga tidak menysar pada orang yang tidak bersalah dan hanya boleh diarahkan ke kaki saja. Aturan diatas juga mengizinkan aparat keamanan menggunakan kekerasan selama memang kekerasan merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk mengamankan kondisi diluar penggunaan senjata api yang tetap memerlukan izin seperti yang tertulis diatas.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan senjata api dalam mengamankan kondisi ini terjadi di banyak provinsi di Mesir seperti Al-

Buhaira, Dakahlia, Bani Suef, Qalubia, Alexandria, Suez, Damiett, Mesir Timur, dan Mesir Barat. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perintah langsung turun dari otoritas tertinggi. Terdapat beberapa tembakan juga mengarah pada orang yang hanya menonton tragedi revolusi dari halaman dan balkon rumah mereka yang mana ini digunakan aparat keamanan untuk berusaha menghindari adanya dokumentasi baik foto maupun video yang dilakukan oleh warga yang menonton tersebut sehingga seluruh tembakan tidak seluruhnya diarahkan pada orang yang bersalah saja. Berikutnya adalah adanya surat perintah yang ditujukan kepada kementerian dalam negeri untuk menyediakan buku laporan terkait jumlah amunisi yang digunakan saat proses pengamanan berlangsung yang mana buku laporan ini sendiri tidak pernah diserahkan pada pemerintah. Fakta secara keseluruhan ditutup dengan laporan dari para saksi mata, dokter, dan pihak rumah sakit salah satunya Rumah Sakit Al-Qasr Al-Aini yang mencatat bahwa korban dari tragedi ini banyak yang mengalami luka pada bagian kepala dan dada sehingga ini jelas berasal dari tembakan yang mengarah sehingga banyak sekali korban yang tidak meninggal akan tetapi kehilangan penglihatannya (M. A. Abdelmottlep 2015).

Salah satu contohnya yang terjadi di Suez bahwa media dilarang untuk meliput dikarenakan banyaknya korban yang berjatuh diakibatkan adanya bentrok antara demonstran dengan polisi yang menggunakan senjata. Dan sesuai dengan data yang dilaporkan bahwa di Suez sendiri terdapat 130 orang mengalami luka-luka hanya pada hari ketiga dimulainya bentrok yang ada disana (Tencer 2011).

Oleh karenanya pada tanggal 6 Oktober 2011 baik Habib Al-Adly, asisten senior Menteri Dalam Negeri, dan sejumlah polisi dinyatakan secara bersalah

dengan dakwaan bahwa mereka telah melakukan pembunuhan pada demonstran yang ada dengan disengaja dan juga adanya percobaan pembunuhan dan keikutsertaan mereka dalam hal ini. Oleh karena itu dari keputusan pengadilan seperti yang tertera sebelumnya semakin membuktikan bahwa koordinasi mereka dalam usaha untuk memusnahkan para demonstran dinyatakan valid (M. A. Abdelmottlep 2015).

Begitu juga dengan apa yang terjadi pasca 11 Februari 2011 yang mana sesuai dengan data yang sudah terjelaskan pada bab sebelumnya bahwa kepolisian dinilai sebagai sekelompok gangster yang membawa senjata untuk mengamankan suatu daerah. Kondisi pada apa yang terjadi diantara 25 Januari hingga 11 Februari 2011 tidak membuat aparat keamanan melakukan reformasi dalam tubuhnya melainkan membuat mereka menjadi bertambah sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Dari data diatas menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan aparat keamanan yang akhirnya menimbulkan banyaknya korban membuat semakin jelas bahwa kekerasan langsung yang pelaku dan korbannya dapat terlihat jelas semakin nyata. Sehingga penulis menganalisis bahwa baik kekerasan yang terjadi antara tanggal 25 Januari hingga 11 Februari 2011 dan pasca 11 Februari 2011 ini masuk dalam kategori kekerasan langsung *survival needs*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa dalam tragedi Revolusi Mesir di tahun 2011 merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat Mesir yang amat mendalam. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disebabkan oleh pihak pemerintah Mesir dibawah kepemimpinan Hosni Mubarak yang sudah memimpin Mesir sejak tahun 1981 setelah kematian dari presiden Mesir sebelumnya yaitu Anwar Sadat. Sejak saat itu Hosni Mubarak mengaktifkan UU darurat No. 162 tahun 1958 yang diperbarui tiap tiga tahun sekali hingga dirinya lengser ketika kecamuknya revolusi Mesir berlangsung. Dimulai dari UU darurat ini yang akhirnya membuat faktor kekerasan baik secara kultural, struktural, dan langsung terjadi.

Kekerasan kultural yang terjadi dalam kasus ini adalah ketika Partai NDP melakukan gerakan untuk memperkuat kekuasaannya, militer yang mendominasi dalam kehidupan sosial politik di Mesir, dan adanya aktor agama yang beraliansi dengan politisi elit untuk melegalkan berbagai tindakannya. Hal ini masuk kedalam kekerasan kultural dikarenakan secara faktor ketiga hal diatas sudah memenuhi kategori dari kekerasan kultural ini sendiri.

UU darurat, korupsi, pengangguran, kemiskinan, aturan otoriter, dan manipulasi dalam pemilu merupakan kondisi yang tidak bisa dilupakan. Hal ini merupakan bentuk dari kekerasan struktural yang terjadi di Mesir dilihat dari bagaimana hal-hal diatas bisa terjadi dan menimpa warga Mesir yang diakibatkan tidak mampunya pemerintah Mesir dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut

diatas. Sehingga dalam hal ini pelaku dari bentuk kekerasan ini terkaburkan dengan kondisi yang sudah terstruktur rapi yang menyebabkan fasilitas dan hak yang sudah semestinya didapatkan oleh warga Mesir terhilangkan.

Akan tetapi yang sangat disayangkan bagaimana tindakan pemerintah Mesir merespon demonstrasi yang berlangsung ketika revolusi terjadi. Kondisi dimana aparat keamanan melakukan tindakan represif untuk menertibkan kondisi sehingga membuat 846 jiwa meninggal dunia dan 189 jiwa lainnya meninggal dunia didalam penjara. Tidak hanya itu melainkan 6.467 jiwa mengalami luka-luka dengan beragam tingkatan dan 263 jiwa lainnya luka-luka didalam penjara. Hal ini sendiri dikarenakan aparat keamanan yang menggunakan senjata dan kendaraan lapis baja untuk menertibkan massa yang melakukan aksi demonstrasi. Kondisi ini diperparah dengan aparat keamanan yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku yang mana mereka mengarahkan dan menembakkan senjata tersebut ke dada dan kepala demonstran sesuai dengan data yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya yang mana seharusnya senjata tersebut hanya boleh diarahkan ke kaki saja sebenarnya. Ini merupakan bentuk kekerasan langsung yang terjadi dalam Revolusi Mesir tahun 2011 sehingga menimbulkan banyaknya jatuh korban jiwa.

Terlihat jelas dari penggambaran diatas bahwa ketiga kekerasan yang disampaikan oleh Galtung dalam teorinya sudah dapat terpenuhi untuk menganalisis kasus yang terjadi dalam revolusi Mesir di tahun 2011 sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu pada kesimpulan ini penulis menyampaikan bahwa konsep teori segitiga kekerasan oleh Galtung sudah bisa dapat menjelaskan bagaimana dalam revolusi mesir ketiga bagian dari teori sudah dapat dijelaskan secara komprehensif.

4.2 Rekomendasi

Hasil analisis dan kesimpulan yang dituliskan oleh peneliti disini dituliskan berdasar pada apa yang terjadi di revolusi Mesir tahun 2011 terkait bagaimana kekerasan dalam ketiga bentuk kekerasan terjadi yang mana didasarkan pada kepemimpinan rezim Hosni Mubarak yang menjabat dalam tiga dekade lamanya. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun terkait penulisan dalam penelitian ini sendiri serta penulis disini menyarankan kepada peneliti berikutnya yang mengangkat kasus ini untuk memiliki kemampuan berbahasa arab yang baik dikarenakan sumber artikel yang tersedia banyak bertuliskan dengan bahasa arab. Untuk kendala yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ketika mencari sumber yang tersaji dalam internet banyak yang sudah tidak lagi tersedia sehingga mengharuskan penulis mencari sumber data dari sumber lainnya lagi. Saran untuk peneliti selanjutnya juga adalah untuk melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara sehingga data yang dimiliki benar-benar bersumber dari pihak yang mengalami atau menjadi saksi dalam tragedi yang terjadi. Dan bagi penelitian berikutnya untuk dapat meneliti bagaimana kondisi Mesir dalam berbagai aspek selepas tahun 2011 sehingga nantinya dapat menjadi alat pembanding terkait bagaimana pemerintahan dan sosial masyarakat berlangsung setelah terjadinya revolusi Mesir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abdelmottlep, Mahmood A. 2015. "The Egyptian revolution: an analysis of the Egyptian police response, the way to the Egyptian police reform (subjective projection)." *Forensic Research & Criminology International Journal* 184.
- Alin, Hurin Hayati. 2016. "Kondisi Mesir tahun 2011 - 2012 dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*.
- Ifrani. 2017. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa ." *Al'Adl*.
- International Commissions of Jurist . 2009. "United Nations Human Rights Council 7th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review ." *ICJ Submission to the Universal Periodic Review of Egypt*, Agustus .
- Juned, Mansur, Asrudin Azwar, and Musa Maliki. 2012. "Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus pada Revolusi Mesir 2011." *Global Jurnal Politik Internasional* 78.
- Kamal, Mustafa, and Pamela Meenalochani. 2012. "Byte Is Mightier Than The Sword: Egypt Revolution Of 2011." *International Journal of Management & Information Systems*.
- Khasyi'in, Nuril. 2019. "The Fall of President Muhammed Hosni Mubarak and The Prospects for Democratization in Egypt." *Jurnal Hukum dan Pemikiran*.
- Makram-Ebeid, Mona. 1989. "Political Opposition in Egypt: Democratic Myth or Reality?" *Middle East Journal* 431-436.
- Manan, Putri Rezki. 2020. "People Power dalam Suksesi Kepemimpinan di Mesir." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Mohamed, Salah S Abdou. 2013. "Egyptian Revolution Causes Incidents and Results."
- Nassar, Heba. 2011. *Growth, Employment Policies and Economic Linkages : Egypt*. Employment Sector Employment Working Paper No. 85 , Geneva: International Labour Office; Employment Policy Dept.
- Noueir, Tarek. 2001. " Estimating the Volume of New Entrants to the Labor Market for 1998/99 ." *Information and Decision Support Center (IDSC)*.

- Pratama, M Ilham Wira. 2019. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance*.
- Reza, Sadiq. 2007. "Endless Emergency : The Case of Egypt." *International and Interdisciplinary Journal*.
- Roushdy, Rania, and Ragui Assaad. 2007. "Poverty and Geographic Targeting in Egypt : Evidence from a Poverty Mapping Exercise."
- Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti Muti'ah Setiawati, and Bambang Cipto. 2015. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- World Bank. 2011. *Arab Republic of Egypt Poverty in Egypt 2008-09 Withstanding the Global Economic Crisis*. Social and Economic Development Group Middle East and North Africa Region, Document of the World Bank.
- World Bank. 2001. *Egypt, Social and Structural Review* . World Bank Publications Report 15535, The World Bank Group.

Buku

- Amin, Galal. 2009. *Egypt and Egyptians in Mubarak's Era: 1981 – 2008*. Cairo: Dar Mirit.
- Anjar Mahmudin NST, M.Ag. 2021. *Sikap Otoriter Orang tua dan Dampaknya Terhadap Kecerdasan Emosional Anak*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Assad, Ragui. 2009. *The Egyptian Labor Market Revisited*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- Brownlee, Jason. 2007. *Authoritarianism in Age of Democratization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, Steven A. 2007. *Ruling but not governing: The military and political development in Egypt, Algeria, and Turkey*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Fahmy, Ninette S. 2002. *The politics of Egypt: state-society relationship*. New York: Routledge.
- Haikel, Mohamed Hassanein. 1995. *1995: Egypt's Gate for the 21th Century*. Cairo: Dar Al-Shorok.
- Handy, Abdel Rahman. 2000. *Democratic Transformation in Egypt, in Democratic*

- Transformation in the Arab World During the Nineties*. Al-Mafraq: Albayt university press.
- Hilal, Ali Eldeen. 1986. *The Democratic Evolution in Egypt: Issues and Discussions*. Cairo: Makatabat Nahdat Al-Shark.
- Kassem, Maye. 2004. *Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Ketchley, Neil. 2017. *Egypt in A Time of Revolution : Contentious Politics and The Arab Spring*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Kienle, Eberhard. 2001. *A Grand Delusion : Democracy and Economic Reform in Egypt*. London: I.B.Touris Publishers.
- Leckman, James F, Catherine Panter-Brick, and Rima Salah. 2014. *Pathways to Peace: The Transformative Power of Children and Families*. Cambridge: The MIT
- Lee, Bandy X. 2019. *Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes, Consequences, and Cures*. New Jersey, Amerika Serikat: John Wiley & Sons, Inc.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richard H. Adams, Jr. 1986. "Development and Social Change in Rural Egypt." 13-17. New York : Syracuse University Press.
- Verme, Paolo, Branko Milanovic, Sherine Al-Shawarby, Sahar El-Tawila, May Gadallah, and Enas Ali A.El-Majeed. 2014. *Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt : Facts and Perceptions Across People, Time, and Space*. Washington DC: The World Bank.

Situs Web

- Abdelaal, Mohamed. 2017. "Emergency Declared: Stabbing the Rule of Law in Egypt." *Jurist Legal News and Commentary | Reporting the rule of law in crisis*. April 29. Accessed Juli 7, 2023. <https://www.jurist.org/commentary/2017/04/mohamed-abdelaal-rule-of-law-in-egypt/>.
- Adryamarthanino, Verelladevanka. 2022. "Perang Enam Hari: Latar Belakang,

- Kronologi, Pemenang, dan Dampak." *Kompas.com*. Juni 6. Accessed Juli 7, 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/06/130000579/perang-enam-hari--latar-belakang-kronologi-pemenang-dan-dampak?page=all>.
- Al Ahram. 2007. *Ahram Online*. Accessed Juli 17, 2023. <http://weekly.ahram.org.eg/2007/837/eg4.htm>.
- Al Jazeera . 2011. *Mubarak meets with economy team*. Februari 5. Accessed Juli 21, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2011/2/5/mubarak-meets-with-economy-team>.
- Al-Ahram . 2005. "Enough is still Enough." *Al-Ahram Weekly Online*. September 8. Accessed Juli 7, 2023. <https://web.archive.org/web/20140919181012/http://weekly.ahram.org.eg/2005/759/eg8.htm>.
- Amnesty International. 2010. "Egypt: Keep Promise to Free Detainees by End of June: Joint statement." *Amnesty International*. Juni 29. Accessed Juli 7, 2023. <https://www.amnesty.org/en/documents/MDE12/027/2010/en/>.
- BBC News. 2007. "Gamal denies desire to lead Egypt." *BBC News*. Mei 2. Accessed Juli 17, 2023. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6614515.stm.
- Fajri, Dwi Latifatul. 2022. *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli dan Contohnya di Indonesia*. April 2022. Accessed Juli 20, 2023. <https://katadata.co.id/agung/berita/624be727c1ac9/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli-dan-contohnya-di-indonesia>.
- Firman, Tony. 2021. *Tirto.id*. Februari 11. Accessed Juli 29, 2022. <https://tirto.id/kejayaan-dan-kejatuhan-hosni-mubarak-sang-diktator-mesir-clBq>.
- Herald Sun. 2011. "4 Confirmed Dead in Egyptian Riots". Februari. Accessed Juni 13, 2023. <https://www.heraldsun.com.au/ipad/egyptian-riots-4/story-fn6s850w-1225995176163>.
- International Center For-Not-For Profit Law. 1962. "Decree 162 on the State of Emergency (no longer in force)." *International Center For Not - For - Profit Law Web Site*. Accessed Juli 6, 2023. https://www.icnl.org/research/library/egypt_162-1958-ar/.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

- Accessed Juli 20, 2023. <https://kbbi.web.id/kultur>.
- Krauthammer, Charles. 2007. "Prelude to the Six Days." *Washingtonpost.com*. Mei 18. Accessed Juli 13, 2023. <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/17/AR2007051701976.html>.
- Mansour, Muhammad. 2017. "I grew up under Mubarak's emergency law. It didn't stop terrorism and Sisi's won't either." *Middle East Eye*. April 13. Accessed Juli 20, 2023. <https://www.middleeasteye.net/opinion/i-grew-under-mubaraks-emergency-law-it-didnt-stop-terrorism-and-sisis-wont-either>.
- Owen, Michael. 2011. "EGYPT: Before uprising against Mubarak, decades of poverty and resignation." *Los Angeles Time*. Januari 28. Accessed Juli 13, 2023. <https://www.latimes.com/archives/blogs/babylon-beyond/story/2011-01-28/egypt-before-uprising-against-mubarak-decades-of-poverty-and-resignation>
- Recknagel, Charles. 2005. "Egypt: Referendum Held On Multi-Candidate Presidential Polls." *Radio Free Europe Radio Liberty*. Mei 25. Accessed Juli 17, 2023. <https://www.rferl.org/a/1058996.html>.
- Saleh, Yasmine. 2011. "Egypt moves to scrap decades-old emergency law." *Reuters*. Agustus 11. Accessed Juli 20, 2023. <https://www.reuters.com/article/us-egypt-emergency-idUSTRE77A3ZC20110811>.
- Swamurti, Aqida. 2011. "Mesir Penjarakan Tiga Mantan Pejabat." *Tempo*. Februari 18. Accessed Juli 26, 2023. <https://dunia.tempo.co/read/314310/mesir-penjarakan-tiga-mantan-pejabat>.
- Tencer, Daniel. 2011. "Report of 'Massacre' in Suez as protests in Egypt Move Into third day." *Rawstory.com*. Januari 26. Accessed Juli 26, 2023. <https://www.rawstory.com/2011/01/reports-massacre-suez-protests-egypt/>.
- The Egyptian Organization for Human Rights. 2008. "“Egypt and The Impact of 27 years of Emergency on Human Rights”." *The Egyptian Organization for Human Rights Founded in 1985*. Mei 28. Accessed Juli 7, 2023. <https://web.archive.org/web/20110201013303/http://en.eohr.org/2008/05/28/%E2%80%9CEgypt-and-the-impact-of-27-years-of-emergency-on-human-rights%E2%80%9D/#more-22>.

Transparency International. 2010. "The 2010 Corruption Perceptions Index Measures The Perceived Levels Of Public Sector Corruption In 178 Countries Around The World." *Transparency International*. Accessed Juli 18, 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2010>.

Williams, Daniel, and Robin Wright. 2005. "Controversy Swirls Over Egypt Vote." *Washington Post*. September 9. Accessed Juli 17, 2023. <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/08/AR2005090800151.html>.